

2018

# ANALISIS SOSIAL EKONOMI

## KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELATIHAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

# **ANALISIS SOSIAL EKONOMI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018**

No. Katalog :  
No. ISBN :  
No. Publikasi :

Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm  
Jumlah Halaman : xvi+111

Naskah :

Diterbitkan Oleh :  
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
(BAPPELITBANGDA KAB. HSS)**

---

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas kehendak dan bimbinganNya publikasi Analisis Sosial Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 dapat diterbitkan. Publikasi ini menyajikan beberapa indikator yang menggambarkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Publikasi ini hanya mencakup aspek-aspek yang dapat di ukur dan tersedianya data. Informasi umum tentang analisis sosial ekonomi yang tercakup dalam tulisan ini antara lain kependudukan, fertilitas, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, kemiskinan, perumahan, teknologi informasi dan komunikasi.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Publikasi Analisis Sosial Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018. Semoga Publikasi ini bermanfaat dan dapat menjadi dasar pijakan untuk Kebijakan dalam Peningkatan Kesejahteraan Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Agustus 2019  
Bappelitbangda  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Kepala,

Drs. H. Iwan Friady, M. AP  
NIP. 19740808 199311 1 002



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Grafik .....	xi
Bab I. Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup dan Tujuan .....	4
1.3 Sumber Data .....	5
1.4 Sistematika Penyajian .....	5
Bab II. Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Bencana....	7
2.1 Persebaran Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin.....	10
2.2 Angka Beban Ketergantungan .....	16
2.3 Data Kependudukan (Akta Kelahiran dan Nomor Induk Penduduk) .....	18
2.3 Fertilitas dan Keluarga Berencana .....	23
Bab III. Kesehatan .....	31
3.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk .....	33
3.2 Cara Pengobatan dan Fasilitas Kesehatan .....	35
3.3 Umur Harapan Hidup.....	41
Bab IV. Pendidikan .....	45

4.1 Angka Melek Huruf.....	47
4.2 Rata-Rata Lama Sekolah .....	49
4.3 Tingkat Pendidikan .....	50
4.4 Tingkat Partisipasi Sekolah .....	52
<b>Bab V. Ketenagakerjaan .....</b>	<b>57</b>
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	58
5.2 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	64
5.3 Jumlah Jam Kerja.....	68
<b>Bab VI. Pola Konsumsi Dan Kemiskinan.....</b>	<b>73</b>
6.1. Pola Konsumsi.....	73
6.2. Kemiskinan.....	80
6.3. Distribusi Pendapatan.....	87
<b>Bab VII. Perumahan, Teknologi Informasi dan     Komunikasi.....</b>	<b>91</b>
7.1 Status Kepemilikan Rumah Tinggal .....	93
7.2 Kondisi Fisik Tempat Tinggal.....	94
7.3 Fasilitas Rumah Tinggal.....	99
7.4 Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	105

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2015-2016, 2016-2017 dan 2017-2018 .....	11
Tabel 2.2	Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2018.....	12
Tabel 2.3	Penduduk Menurut Kecamatan dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.....	14
Tabel 2.4	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.....	16
Tabel 2.5	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 .....	17
Tabel 2.6	Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018(%).....	22
Tabel 2.7	Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Usia 15 – 49 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/ Cara KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018(%).....	29

Tabel 3.1	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018(%).....	35
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%).....	48
Tabel 4.2	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%) .....	51
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2018 .....	54
Tabel 4.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2018 .....	55
Tabel 5.1	Distribusi Persentase Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%) .....	61
Tabel 5.2	Persentase Pengangguran, Setengah Pengangguran dan Pekerja Paruh Waktu Terhadap Jumlah Angkatan	

	Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%).....	71
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%) .....	75
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%).....	76
Tabel 6.3	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018 .....	77
Tabel 6.4	Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.....	79
Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%).....	93
Tabel 7.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Luas Lantai dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 (%) .....	95
Tabel 7.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Perkapita (Kriteria Rumah Sehat) dan Daerah Tempat	

Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%) .....	96
Tabel 7.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018 (%).....	97
Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%).....	99

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persebaran Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Menurut Kecamatan Tahun 2018....	13
Grafik 2.2	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%).....	20
Grafik 2.3	Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Status Perkawinan dan Daerah Tempat Tinggal, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.....	23
Grafik 2.4	Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%) .....	25
Grafik 2.5	Persentase Perempuan Pernah kawin Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tenaga Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%).....	27

Grafik 2.6	Persentase Penduduk Perempuan Pernah kawin Usia 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%) .....	28
Grafik 3.1	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018 (%).....	34
Grafik 3.2	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan Dalam Sebulan Terakhir Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.....	36
Grafik 3.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%).....	38
Grafik 3.4	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.....	41
Grafik 3.5	Umur Harapan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014- 2018.....	42

Grafik 4.1	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun), di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.....	50
Grafik 5.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2015 dan 2017-2018.....	59
Grafik 5.2	Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%)....	60
Grafik 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2015 dan 2017-2018.....	62
Grafik 5.4	Persentase Penduduk yang Statusnya Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%) .....	63
Grafik 5.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%) .....	65
Grafik 5.6	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%).....	66

Grafik 5.7	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 .....	68
Grafik 5.8	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja Selama Seminggu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 .....	69
Grafik 6.1	Garis Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018.....	84
Grafik 6.2	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018 (%).....	85
Grafik 6.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018.....	86
Grafik 6.4	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018 .....	87
Grafik 6.5	Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018.....	89
Grafik 7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Memasak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%) .....	103
Grafik 7.2	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang MenguasaiMemiliki dan Menggunakan Telepon Seluler (HP) Dalam Tiga Bulan Terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 .....	106

Grafik 7.3	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 .....	106
Grafik 7.4	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 .....	107
Grafik 7.5	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Komputer Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 .....	108
Grafik 7.6	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Komputer Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 .....	108
Grafik 7.7	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 .....	109
Grafik 7.8	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 .....	110



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum menurut Badan Pusat Statistik (2000) merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia. Dimana antara kemiskinan dan kesejahteraan selalu memiliki hubungan yang negatif, dengan demikian semakin rendah tingkat kemiskinan di Indonesia menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk di Indonesia.

Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional. Indikator utama keberhasilan pembangunan nasional salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2000).

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dengan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi yang bersentuhan dengan masyarakat. Wujud realisasi dari kebijakan tersebut diantaranya Program Wajib Belajar 9 Tahun, Program KB, intervensi/ perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin melalui program bantuan dan perlindungan sosial: Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Indonesia Pintar

(KIS)/Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan untuk penyandang cacat dan lansia, program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Program-program yang diyakini sangat pro rakyat tersebut diharapkan dapat melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas SDM, dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan itu diperlukan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan adalah indikator sosial ekonomi yang diharapkan dapat menggambarkan fenomena sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan taraf hidup, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Indikator tersebut dapat menjadi sumber petunjuk sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan memberikan hasil bagi masyarakat dan dapat mengetahui indikator yang belum

memberikan hasil optimal sehingga dapat dijadikan salah satu fokus pembangunan selanjutnya.

## **1.2 Ruang Lingkup dan Tujuan**

Analisis Sosial Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini mencakup semua bidang sosial ekonomi antara lain: Kependudukan dan Fertilitas, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pola konsumsi dan Kemiskinan, Perumahan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2018. Penerbitan Analisis Sosial Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat keberhasilan pembangunan yang ditunjukkan dengan tercapainya tujuan pembangunan. Dari gambaran tersebut diharapkan diperoleh hal-hal yang bermanfaat guna mengantisipasi berbagai kendala atau hambatan sehingga dapat disusun perencanaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indikator ini juga sangat penting bagi para perencana pembangunan dan pengambil kebijakan daerah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan telah dicapai. Apalagi sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000, dimana

kabupaten/kota memiliki kebijakan dan kewenangan yang lebih besar untuk menjalankan roda pembangunan, sehingga daerah mempunyai peran sangat penting dalam menyiapkan dan meningkatkan sumber daya yang dimilikinya.

### **1.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk materi agregat dan komposisi penduduk diperoleh dari proyeksi penduduk SP2010;
2. Untuk materi kesehatan, fertilitas, KB, pendidikan, perumahan, pola konsumsi, kemiskinan dan teknologi informasi dan komunikasi diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018;
3. Untuk materi ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2018.

### **1.4 Sistematika Penyajian**

Publikasi Analisis Sosial Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan

- Bab II. Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana
- Bab III. Kesehatan
- Bab IV. Pendidikan
- Bab V. Ketenagakerjaan
- Bab VI. Pola Konsumsi dan Kemiskinan
- Bab VII. Perumahan dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

## **BAB II**

# **KEPENDUDUKAN, FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA**

Penduduk dengan berbagai aspeknya mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan. Penduduk berperan sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri, maka penduduk harus dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya sebagai obyek pembangunan, penduduk harus dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan menerima segala konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Kuantitas penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar pembangunan jika ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Namun sebaliknya jumlah penduduk yang besar juga menyimpan potensi untuk menjadi beban dalam proses pembangunan apabila sumber daya manusianya tersebut berkualitas rendah. Untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut harus dimulai dengan perencanaan pembangunan kependudukan yang berkualitas. Dengan kata lain perencanaan harus didasarkan

pada fakta dan data kependudukan yang akurat. Berdasarkan data kependudukan tersebut, pemerintah maupun pihak lain seperti dunia usaha dapat menyusun berbagai perencanaan, penentuan kebijakan, dan evaluasi hasil pembangunan. Dengan demikian, semakin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia maka perencanaannya akan makin mudah dan tepat.

Saat ini konsentrasi data kependudukan tersebut tidak hanya terbatas pada penyediaan data kuantitas dan dinamika penduduk, tetapi data kependudukan juga digunakan untuk melihat fenomena sosial masyarakat yang semakin berkembang. Untuk itu gambaran mengenai kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan dalam pembangunan, juga sangat dibutuhkan. Gambaran tersebut meliputi pencapaian pembangunan pada komponen-komponen sosial yang berpengaruh pada kualitas penduduk seperti bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan.

Kondisi penduduk suatu daerah tentu akan sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan dan menekan seminimal mungkin efek negatif

dari pembangunan, diperlukan pemahaman tentang karakteristik penduduk di suatu daerah. Artinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan di suatu daerah, harus didasarkan pada kondisi penduduk. Perencanaan pembangunan yang meniadakan variabel penduduk disebut kebijakan yang tidak sempurna, dan kebijakan kependudukan yang tidak dikaitkan dengan pembangunan adalah tidak bermakna. Peranan penduduk selama pelaksanaan pembangunan tidak boleh diabaikan karena dinamika kependudukan yang kompleks, dampaknya baru akan terasa dalam jangka panjang.

Perkembangan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh keterkaitan antara variabel demografi dan non-demografi, sehingga setiap daerah memiliki potensi dan keunikan karakteristik penduduk masing-masing. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang berbeda serta suku dan adat istiadat yang beraneka ragam. Potensi dan keunikan karakteristik penduduk di suatu daerah merupakan salah satu hal yang diangkat dalam kerangka otonomi daerah. Potensi dan keunikan tersebut harus tetap menjadi fokus kebijakan kependudukan di masing-masing daerah, karena berbagai perbedaan tersebut pada akhirnya membutuhkan kebijakan kependudukan yang bisa berbeda dengan daerah lain. Dalam

pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah diberi hak otonom untuk menetapkan kebijakan kependudukan yang diselaraskan dengan kebijakan kependudukan nasional.

## **2.1 Persebaran Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin**

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 dan SP tahun 2010 dilakukan penghitungan proyeksi penduduk kabupaten/kota dengan menggunakan metode RUP (*rural urban projection*) dengan memperhatikan indikator demografi angka harapan hidup ( $E_0$ ), total *fertility rate*/angka total kelahiran (TFR), *infant mortality rate*/angka kematian bayi (IMR) dan *age specific fertility rate*/angka kelahiran menurut umur (ASFR) dan migrasi. Dari hasil penghitungan tersebut diperoleh angka proyeksi penduduk kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 berjumlah sekitar 235,2 ribu jiwa, jumlah tersebut secara relatif mengalami pertumbuhan sebesar 1,13 persen dari tahun 2017-2018, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2016-2017 yaitu sebesar 1,17 persen.

**Tabel 2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2016, 2016-2017 dan 2017-2018**

TAHUN	PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN (%)
(1)	(2)	(3)
2015-2016	229.889	1,20
2016-2017	232.587	1,17
2017-2018	235.217	1,13

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Kab.HSS

Adanya kelahiran dan adanya migrasi masuk dari daerah lain merupakan faktor penambah penduduk. Perpindahan penduduk biasanya mengalir dari daerah perdesaan ke perkotaan, atau urbanisasi. Daerah yang tingkat kepadatan tertinggi akan dihadapkan pada permasalahan kebutuhan akan perumahan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu juga harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan sarana pendidikan yang terjangkau bagi penduduknya.

Di sisi lain, daerah yang padat biasanya lebih cepat berkembang dalam hal perekonomian di banding daerah yang jarang penduduknya, karena itu perlu upaya menciptakan pembangunan merata di setiap daerah disertai

penciptaan lapangan kerja, dengan tidak melupakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

**Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2018**

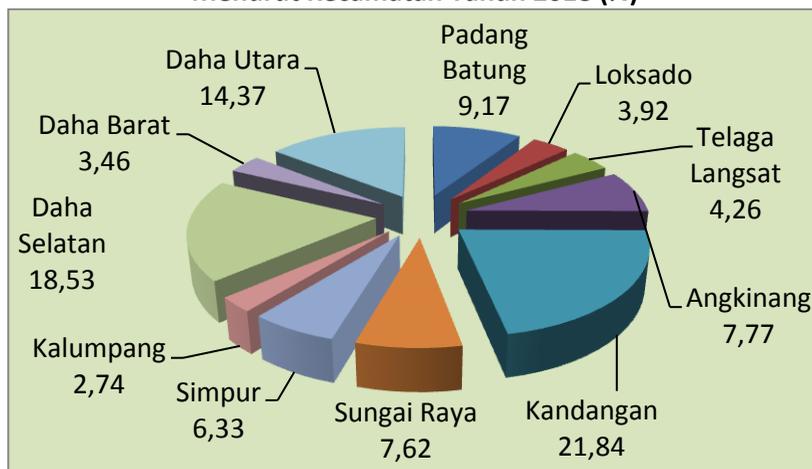
KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	RATA-RATA PENDUDUK PER KM <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Padang Batung	21.558	203,93	106
020 Loksado	9.219	338,89	27
030 Telaga Langsat	10.013	58,08	172
040 Angkinang	18.271	58,40	313
050 Kandangan	51.364	106,71	481
060 Sungai Raya	17.913	80,96	221
070 Simpur	14.896	82,35	181
080 Kalumpang	6.446	135,07	48
090 Daha Selatan	43.592	322,82	135
091 Daha Barat	8.140	149,62	54
100 Daha Utara	33.805	268,11	126
JUMLAH	235.217	1.804,94	130

Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Kab. HSS

Peningkatan jumlah penduduk harus ditangani dengan baik dan komprehensif. Pemerintah daerah melalui SKPD/dinas/instansi terkait perlu melakukan upaya pengendalian jumlah penduduk secara terpadu dan

berkesinambungan dan diiringi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Gambaran kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Grafik 2.1. Persebaran Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2018 (%)**



Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Kab. HSS

Pada tahun 2018 jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah penduduk Kecamatan Kandangan yang mencapai angka 51.364 jiwa. Sedangkan luas wilayah kecamatan ini sekitar 106,71 km<sup>2</sup>, berarti kepadatan penduduk kecamatan Kandangan mencapai angka 481 jiwa per km<sup>2</sup>. Penduduk terbanyak kedua adalah kecamatan Daha Selatan yaitu 43.592 jiwa, dengan tingkat

kepadatan penduduk mencapai 135 jiwa untuk setiap km<sup>2</sup>. Meskipun jumlah penduduk Kecamatan Daha Selatan terbanyak kedua dari kecamatan lainnya , akan tetapi dari segi kepadatan penduduk kecamatan Daha Selatan berada di urutan ke enam dari kecamatan lainnya.

**Tabel 2.3 Penduduk Menurut Kecamatan dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**

Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Padang Batung	10.808	10.750	100,54
020 Loksado	4.694	4.525	103,73
030 Telaga Langsat	5.078	4.935	102,90
040 Angkinang	9.178	9.093	100,93
050 Kandangan	25.555	25.809	99,02
060 Sungai Raya	8.832	9.081	97,26
070 Simpur	7.342	7.554	97,19
080 Kalumpang	3.259	3.187	102,26
090 Daha Selatan	21.959	21.633	101,51
091 Daha Barat	4.198	3.942	106,49
100 Daha Utara	16.825	16.980	99,09
Jumlah	117.728	117.489	100,20

Sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Kab. HSS

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 menunjukkan angka sekitar 100,20. Ini

berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 100 penduduk laki-laki atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki hampir sama dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Terdapat empat kecamatan dengan rasio berada dibawah 100, yaitu kecamatan Kandangan, Sungai Raya, Simpur dan Daha Utara. Sedangkan terdapat 7 kecamatan yang memiliki rasio diatas 100.

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai dari usia muda sampai menjelang masa produktif didominasi oleh penduduk laki-laki. Hal tersebut terlihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada Tabel 2.4. Pada kelompok 0–4 tahun sampai 25-29 tahun dan kelompok umur 40-44 tahun, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan diatas angka 100, artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, kecuali pada kelompok 30–34 tahun, kelompok umur 35-39 tahun, dan kelompok umur 45 ke atas. Rasio jenis kelamin pada penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 100. Artinya pada kelompok usia tua, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh mereka yang berjenis kelamin perempuan. Keadaan ini mengindikasikan bahwa harapan hidup perempuan lebih panjang dibandingkan

penduduk laki-laki.

**Tabel 2.4 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**

Kelompok Umur	Laki-Laki/ Male	Perempuan/ female	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	10.298	9.888	104,15
5-9	11.389	11.085	102,74
10-14	11.035	10.122	109,02
15-19	9.993	8.873	112,62
20-24	8.703	7.827	111,19
25-29	8.413	8.006	105,08
30-34	8.413	8.433	99,76
35-39	8.945	9.175	97,49
40-44	9.052	9.010	100,47
45-49	8.519	8.566	99,45
50-54	7.250	7.398	98,00
55-59	5.367	5.730	93,66
60-64	4.544	5.123	88,70
65-69	2.788	3.338	83,52
70-74	1.717	2.449	70,11
75+	1.302	2.466	52,80
Jumlah	117.728	117.489	100,20

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Kab.HSS

## 2.2 Angka Beban Ketergantungan

Ada tiga pengelompokan penduduk berkaitan antara

struktur umur dan kemampuan memproduksi secara ekonomi, yaitu, kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebesar 27,13 persen, kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 66,89 persen dan kelompok usia tua (65+) sebesar 5,98 persen. Berdasarkan kelompok umur tersebut diperoleh angka besarnya rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang belum produktif/tidak produktif dengan orang yang produktif. Pada Tabel 2.5. terlihat kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki komposisi penduduk muda sekitar 27,13 persen, penduduk usia produktif sekitar 66,89 persen dan penduduk usia tua sekitar 5,98 persen, dengan rasio ketergantungan penduduk sebesar 49,50 persen yang berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk usia produktif, menanggung sekitar 49 sampai 50 orang yang tidak produktif. Angka tersebut relatif sama dibandingkan tahun lalu dimana ditahun 2017 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 sampai 50 orang penduduk tidak produktif.

**Tabel 2.5. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK	%	RASIO KETERGANTUNGAN		
			TOTAL	MUDA	TUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

0 - 14	63.817	27,13	49,50	40,56	8,94
15 - 64	157.340	66,89			
65+	14.060	5,98			
JUMLAH	235.217				

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Kab. HSS

### 2.3 Data Kependudukan (Akta Kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan)

Dokumen Kependudukan merupakan dokumen yang sangat penting bagi masyarakat yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Dokumen kependudukan tersebut berupa Akta – Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran , Akta Perkawinan/Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak dan Akta Kematian), Kartu Keluarga, KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA).

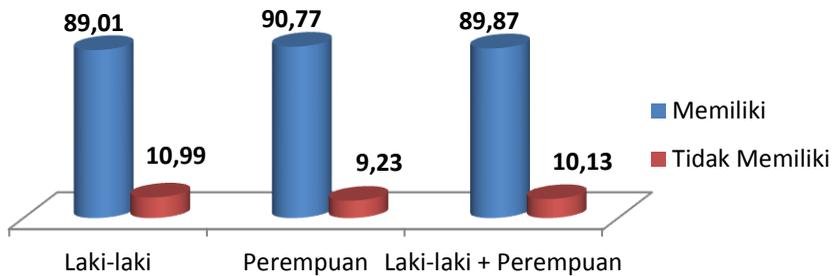
Sesuai dengan Undang – Undang Nomo 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai

alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan merupakan hak dan identitas setiap orang yang digunakan untuk berbagai macam urusan seperti akta kelahiran untuk mengurus kepentingan sekolah dan lain sebagainya.

Saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang. Hal itu terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang baru akan mengurus dokumen kependudukan apabila dokumen tersebut diperlukan dalam waktu dekat saat ada keperluan, sebelum memerlukan mereka tidak mengurus dokumen kependudukannya. Saat waktunya diperlukan mereka pun segera mengurusnya dan ingin segera cepat selesai. Oleh karena itu, apabila ada perubahan data kependudukan perlu segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Misalnya ada peristiwa kelahiran serta perubahan – perubahan data kependudukan lainnya seperti perubahan Kartu Keluarga, Perubahan Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap milik mereka.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan 90 persen dari seluruh anak usia 0 hingga 18 tahun, memiliki akta kelahiran pada tahun 2018. Target ini merupakan bagian dari Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan. Menurut data dari SUSENAS tahun 2018, persentase penduduk berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran sebesar 89,87 persen, berarti masih ada 10,13 persen penduduk berumur 0-17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran. Persentase penduduk laki-laki dan persentase penduduk perempuan berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran tidak berbeda jauh. Diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran semakin baik, sehingga persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran terutama penduduk yang berumur 0-18 tahun pada tahun 2019 bisa mencapai angka 95 persen (target nasional) bahkan 100 persen.

**Grafik 2.2 Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**



Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi.

Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Akta Catatan Sipil sangat dibutuhkan Penduduk di semua strata sosial, karena merupakan awal dan salah satu persyaratan untuk pengurusan pelayanan publik lainnya. Pada dokumen kependudukan tersebut ada tercantum data NIK.

Menurut data SUSENAS 2018, persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) sebesar 99,30 persen demikian juga persentase penduduk yang berumur 17 tahun ke atas mencapai 99,17 persen. Dengan demikian hampir semua penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah memiliki NIK.

**Tabel 2.6. Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	
	5 Tahun ke Atas	17 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	99,20	99,14
Perempuan	99,39	99,19
Laki-laki + Perempuan	99,30	99,17

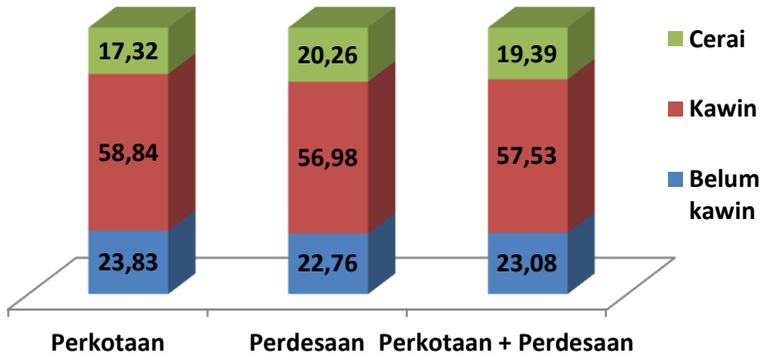
**Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS**

## **2.3 Fertilitas dan Keluarga Berencana**

Fertilitas (kelahiran) merupakan salah satu komponen perubahan jumlah penduduk disamping mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan). Besarnya kelahiran antara lain dipengaruhi oleh jumlah wanita berstatus pernah/sedang kawin, usia perkawinan pertama, dan tingkat partisipasi keluarga berencana (KB). Susenas 2018 mencatat persentase wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berstatus kawin sebesar 57,53 persen.

Semakin besar persentase wanita berstatus kawin semakin besar peluang untuk punya anak (melahirkan). Peluang penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas di perdesaan untuk memiliki anak tidak berbeda jauh dibanding di perkotaan. Sekitar 58,84 persen penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas di perkotaan yang berstatus kawin, sedangkan di perdesaan 56,98 persen.

### **Grafik 2.3 Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Daerah Tempat Tinggal, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**



Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

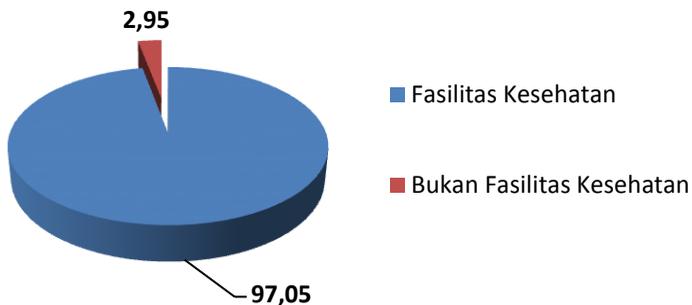
Proses persalinan berkaitan erat dengan keselamatan bayi yang dilahirkan dan sang ibu yang melahirkan. Penanganan yang tepat oleh tenaga penolong berkualitas merupakan hal yang penting karena resiko kematian yang dapat terjadi sangat tinggi.

Target *Sustainable Development Goals (SDGs)* bidang kesehatan yang berkaitan dengan kematian bayi dan kematian ibu adalah target 3. Target 3 terkait dengan penurunan kematian bayi (mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan angka kematian neonatal hingga 2 per 1000 kelahiran hidup) dan penurunan angka kematian ibu (mengurangi angka kematian Ibu hingga dibawah 70 per 100.000 kelahiran hidup). Cakupan persalinan

yang tinggi dan yang memenuhi standar persalinan merupakan indikator *proxy* dari angka kematian bayi. Untuk mempercepat pencapaian target SDGs, Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan bahwa semua persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan memulai program Jampersal (jaminan Persalinan), yaitu suatu paket program yang mencakup pelayanan antenatal, persalinan, posnatal dan keluarga berencana.

Pada grafik 2.4 Menunjukkan 97,05 persen perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir melahirkan di fasilitas kesehatan yaitu 37,23 persen melahirkan di rumah sakit, 15,91 persen melahirkan di rumah bersalin/klinik, 14,55 persen melahirkan di puskesmas, 2,07 persen melahirkan di Pustu, 10,82 persen melahirkan di praktik tenaga kesehatan, dan 16,47 persen melahirkan di Polindes/Poskesdes. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan ibu dan anak sewaktu persalinan.

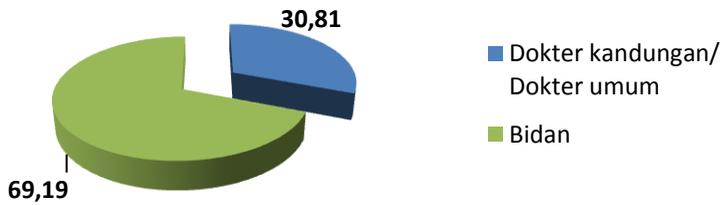
**Grafik 2.4. Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**



Sumber: Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

Berdasarkan data Susenas tahun 2018 hampir semua Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga paramedis seperti seperti dokter, perawat dan bidan. Ini berarti program pemerintah dengan menempatkan bidan di desa (BdD) dalam rangka pengurangan tingkat kematian bayi dan ibu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya persalinan yang ditolong oleh tenaga bidan yang persentasinya menduduki urutan pertama dalam menolong persalinan yaitu 69,19 persen.

**Grafik 2.5. Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tenaga Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%)**



**Sumber: Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS**

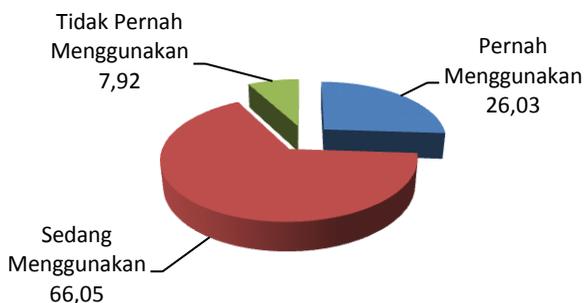
Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Karena Keluarga Berencana adalah suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, maka dari itu program KB ini diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang

Perlu diketahui, bahwa Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan yaitu dengan penggunaan alat-alat

kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Berdasarkan data SUSENAS 2018, persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan KB sebesar 66,05 persen dan yang pernah menggunakan sebesar 26,03 persen. Hal ini menunjukkan lebih dari separuh penduduk perempuan usia 15-49 tahun sedang menggunakan KB (peserta KB aktif).

**Grafik 2.6 Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%)**



**Sumber: Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS**

Tabel 2.7. menunjukkan bahwa dari alat/cara KB yang digunakan, sebagian besar menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (Non MKJP) seperti suntikan KB, Pil dan

kodom yaitu sebesar 84,33 persen. Sedangkan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti Tubektomi/MOW, vasektomi/MOP, IUD dan susuk KB/ Implan yaitu sebesar 14,66 persen. Sisanya 1,01 persen menggunakan cara/alat KB tradisional. Untuk penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek (Non MKJP) daerah perdesaan lebih besar persentasenya dibandingkan perkotaan yaitu masing-masing sebesar 87,38 persen dan 76,58 persen. Sedangkan, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) lebih banyak di perkotaan (19,85 persen) dibandingkan di perdesaan (12,62 persen).

**Tabel 2.7. Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, diKabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%)**

Alat/Cara Kontrasepsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Alat/ Cara KB Modern			
- MKJP*	19,85	12,62	14,66
- Non MKJP	76,58	87,38	84,33
Cara Tradisional	3,57	0,00	1,01

Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

- MKJP = Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Meliputi Tubektomi/MOW, Vasektomi/MOP, IUD dan Susuk KB / Implan
- Non MJKP meliputi Suntikan KB, Pil dan Kondom
- Cara tradisional meliputi metode menyusui alami, pantang berkala / kalender dan lainnya



## **BAB III**

# **KESEHATAN**

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan suatu daerah. Semakin baik derajat kesehatan masyarakat mengindikasikan semakin baiknya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk melakukan berbagai macam kegiatan sehingga memiliki kesempatan untuk mencapai hasil yang optimal.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan memperbanyak penyediaan fasilitas kesehatan sampai ke pelosok. Fasilitas utama yang diperlukan oleh masyarakat adalah puskesmas dan puskesmas pembantu, karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala

lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil. Selain itu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah selama ini yaitu dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga berperilaku hidup sehat.

Tujuan diselenggarakan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing manusia Indonesia.

Pelayanan kesehatan di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kesehatan melalui pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan melalui rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, klinik, balai pengobatan, toko obat dan sarana lainnya. Indonesia saat ini menghadapi masalah kesehatan yang kompleks, disparitas pengetahuan kesehatan masyarakat tentang kesehatan masih amat besar, sementara masalah yang dihadapi makin beragam, oleh karena itu akses masyarakat ke pelayanan kesehatan harus dibuka.

Pembangunan kesehatan membutuhkan sumber daya untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya kesehatan adalah perpaduan antara sumber daya teknologi, sumber daya manusia, dan manajemen dalam sektor kesehatan.

### **3.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk**

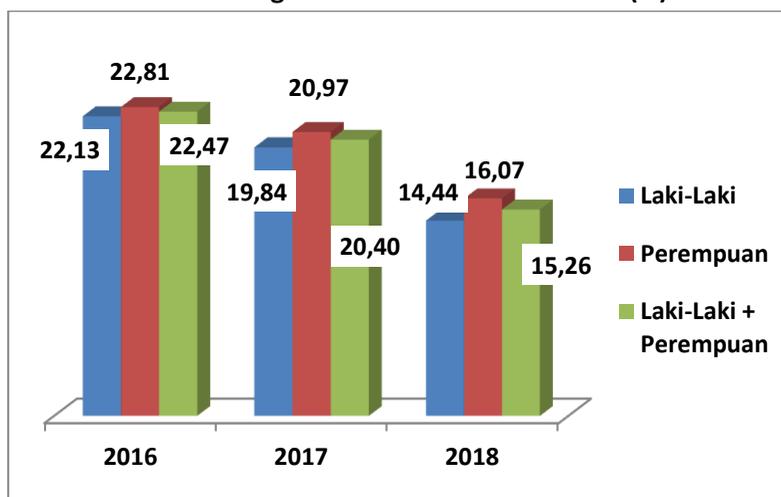
Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Beragam indikator yang bisa dijadikan ukuran untuk melihat derajat kesehatan penduduk seperti angka kesakitan (*morbidity rate*) dan rata-rata lama sakit.

Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari pada periode sebulan terakhir sebelum pencacahan. Sebulan terakhir adalah jangka waktu satu bulan terakhir yang berakhir satu hari sebelum pencacahan. Sedangkan rata-rata lama sakit merupakan rata-rata lama hari penduduk menderita keluhan kesehatannya.

Berdasarkan data Susenas 2018, status kesehatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercermin dari

angka kesakitan yang mencapai 15,26 persen. Ini berarti pada periode satu bulan sebelum survei, sekitar 15,26 persen penduduknya mengalami gangguan kesehatan. Bila dibanding dengan angka kesakitan tahun sebelumnya tahun (2017), maka terjadi penurunan angka kesakitan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018. Dimana angka kesakitan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017 mencapai angka 20,40 persen

**Grafik 3.1. Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018 (%)**



Sumber : Diolah dari Susenas 2016-2018, BPS Kab. HSS

Pada grafik 3.1. angka kesakitan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, terlihat bahwa sedikit lebih tinggi angka kesakitan penduduk perempuan yaitu sebesar 16,07 persen dibanding penduduk laki-laki yang hanya 14,44 persen. Hal ini salah satunya dikarenakan pada sebagian penduduk perempuan hampir tiap bulannya mengalami keluhan fisik karena menstruasi. Keluhan fisik karena menstruasi atau hamil juga termasuk keluhan kesehatan.

### 3.2 Cara Pengobatan dan Fasilitas Kesehatan

**Tabel 3.1. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018 (%)**

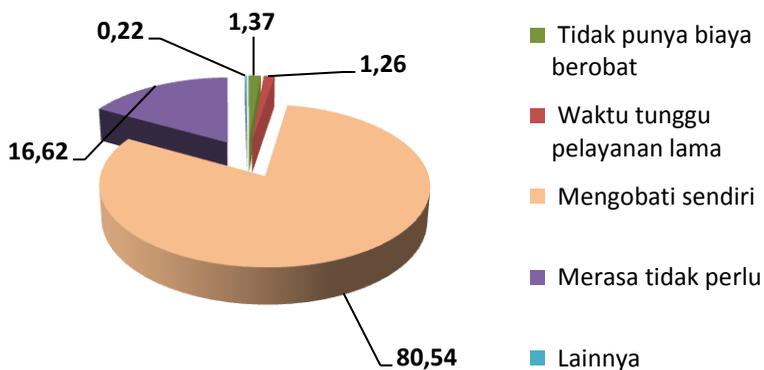
Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	48,95	54,24	51,62
2017	35,47	39,39	37,59
2018	44,91	53,12	49,33

Sumber : Diolah dari Susenas 2016-2018, BPS Kab. HSS

Pada tahun 2018 penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan hampir separuh yang mengalami keluhan kesehatan melakukan pengobatan dengan cara berobat jalan ke tempat berobat yaitu 49,33 persen. Hal itu mungkin karena si sakit

menganggap keluhan yang diderita harus segera di obati ke fasilitas kesehatan. Persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan menunjukkan persentase yang lebih tinggi (53,12 persen) dibandingkan persentase penduduk laki-laki (44,91 persen) dalam hal berobat jalan.

**Grafik 3.2. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan yang Tidak Berobat Jalan Dalam sebulan Terakhir Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%)**



Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

Pada grafik 3.2 menunjukkan alasan utama penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak berobat jalan paling

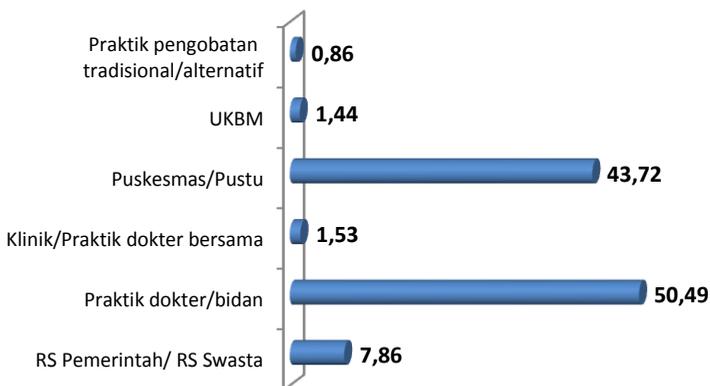
banyak karena melakukan pengobatan dengan cara mengobati sendiri, yaitu dengan cara membeli obat sendiri ke warung atau ke toko obat kemudian dikonsumsi, berdasarkan diagnosa sendiri dengan persentase sebesar 80,54 persen. Hal itu mungkin karena si sakit menganggap keluhan yang diderita hanya berupa sakit ringan saja dan dapat diobati sendiri sehingga tidak perlu pergi ke fasilitas kesehatan.

Tinggi rendahnya taraf kesehatan suatu daerah sangat tergantung pada upaya masyarakat untuk memperbaiki tingkat kesehatan dan gizinya. Tinggi rendahnya upaya ini dapat diukur dari sejauh mana fasilitas dan pelayanan kesehatan yang tersedia seperti berbagai sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan penyediaan obat. Penyediaan berbagai macam fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan lainnya merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pemberian penanganan yang lebih dalam mengatasi keluhan kesehatan masyarakat melalui fasilitas yang sudah tersedia. Selanjutnya tergantung kepada kesadaran masyarakat untuk memanfaatkannya yaitu dengan mengunjungi fasilitas-fasilitas tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki taraf

kesehatannya.

Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berobat jalan ke fasilitas kesehatan yang ada. Berdasarkan Susenas 2018, puskesmas/pustu dan praktek dokter/bidan/tenaga kesehatan masih merupakan tempat berobat jalan yang paling banyak dikunjungi oleh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

**Grafik 3.3. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%)**



Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

Dari Grafik 3.3. dapat dilihat bahwa dari seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan, terbanyak yang dikunjungi untuk berobat jalan adalah ke praktek dokter/bidan/perawat yaitu sebanyak 50,49 persen. Disusul ke puskesmas/pustu sebesar 43,72 persen, berobat ke rumah sakit pemerintah/ rumah sakit swasta sebesar 7,86 persen dan berobat ke ke praktek/ klinik dokter bersama sebesar 1,53 persen. Sedangkan sisanya ke UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan) sebesar 1,44 persen, dan praktik pengobatan tradisional/ alternatif sebesar 0,86 persen. Besarnya persentase penduduk yang berobat jalan ke praktek dokter/bidan/perawat adalah merupakan tanda kesadaran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan betapa penting dan bernilainya kesehatan. Mereka rela membayar lebih atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Selain itu perhatian khusus perlu juga terus diberikan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan di puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang murah dan mudah mengaksesnya.

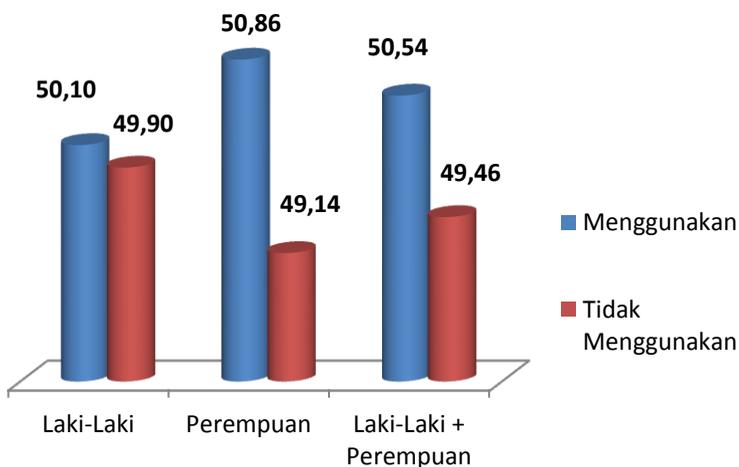
Jangan mau menjadi sadikin, "**sakit sedikit, langsung miskin**". Karena mereka tak punya biaya berobat, apalagi berbiaya besar dari tindakan operasi. Sungguh memberatkan...! Padahal, semua Warga Indonesia dapat terhindar dari musibah ini. Salah satunya adalah dengan memiliki jaminan kesehatan.

Tidak ada orang yang ingin atau berencana jatuh sakit. Punya jaminan/asuransi kesehatan bukan berarti Anda seperti merencanakan jatuh sakit di kemudian hari. Sama halnya seperti peribahasa, “Sedia payung sebelum hujan,” jaminan/asuransi kesehatan bisa dianggap seperti payung kesehatan Anda. Tak perlu sakit dulu untuk punya jaminan/asuransi kesehatan. Saat sakit, kita tidak perlu pusing memikirkan berapa besar biaya pengobatan yang akan kita keluarkan. Sehingga kita bisa lebih tenang dan fokus pada proses pengobatan dan perawatan yang akan dijalani untuk penyembuhan.

Berdasarkan data Susenas 2018, Persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan pada tahun 2018 separuh dari penduduk yang berobat jalan (50,54 persen). Dari data tersebut masih ada separuh penduduk yang berobat jalan tidak menggunakan jaminan kesehatan. Kemungkinan karena belum mempunyai jaminan kesehatan atau sudah memiliki jaminan kesehatan tetapi tidak menggunakan jaminannya dengan alasan beberapa faktor. Jaminan kesehatan yang dimiliki adalah jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan bila nama yang tertera dalam kartu atau

lainnya melakukan perawatan kesehatan seperti : ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Jika dilihat dari jenis kelamin baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan tidak berbeda jauh dalam menggunakan jaminan kesehatan ketika berobat jalan (kisaran 50 persen).

**Grafik 3.4. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%)**



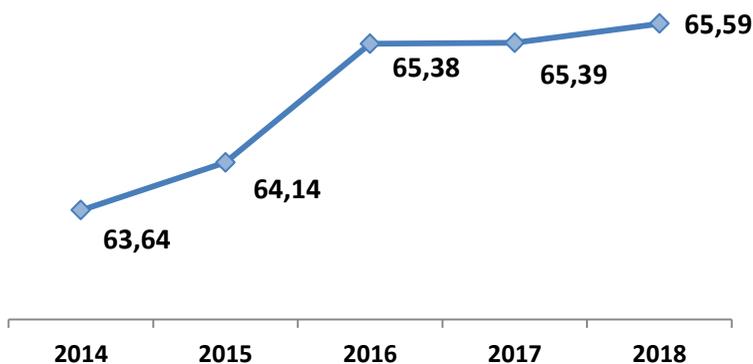
Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

### 3.3 Umur Harapan Hidup

Sebagai salah satu indikator kesehatan, umur harapan hidup (UHH) digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang dapat diartikan jumlah tahun yang

diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya dibidang kesehatan.

**Grafik 3.5. Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 (Tahun)**



Sumber : IPM Metode Baru 2014-2018, BPS Kab. HSS

Pada grafik 3.5 memperlihatkan perkembangan UHH selama kurun waktu 2014-2018, umur harapan hidup penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami peningkatan umur harapan hidup sebesar 0,20 tahun menjadi 65,59 tahun, peningkatan tersebut

tidak terlalu besar jika dibandingkan peningkatan pada tahun 2016 yang sebesar 1,24 tahun. Umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 tercatat 65,59 tahun yang berarti umur yang diharapkan dapat dicapai bayi yang baru lahir pada tahun 2018 untuk hidup mencapai 65,59 tahun. Dengan terus meningkatnya umur harapan hidup penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka diharapkan derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus meningkat.



## **BAB IV**

# **PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, gender dan lokasi geografis. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap - tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan rakyat suatu bangsa maka semakin besar akses dan peluang bangsa tersebut untuk berkembang dalam era globalisasi yang semakin nyata. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa negara yang memprioritaskan pembangunan pendidikan tumbuh lebih cepat dibandingkan negara yang kurang memperhatikan masalah pendidikan.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang

menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator- indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

#### **4.1 Angka Melek Huruf**

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf sebetulnya sudah berjalan sejak lama, namun tidak semua masyarakat

mengikuti program tersebut karena faktor usia. Banyak masyarakat pedesaan yang sudah lanjut usia buta huruf, tetapi masyarakat tersebut tidak tertarik lagi mengikuti program pemberantasan buta huruf, sehingga angka buta huruf susah diturunkan untuk kelompok umur tua.

**Tabel 4.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**

Kemampuan Membaca dan Menulis	Jenis Kelamin		Laki_Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
- Mampu Baca Tulis (melek huruf)	99,73	98,15	98,93
Huruf Latin	99,40	97,15	98,44
Huruf lainnya	34,59	33,23	33,91
- Buta Huruf	0,27	1,85	1,07

Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

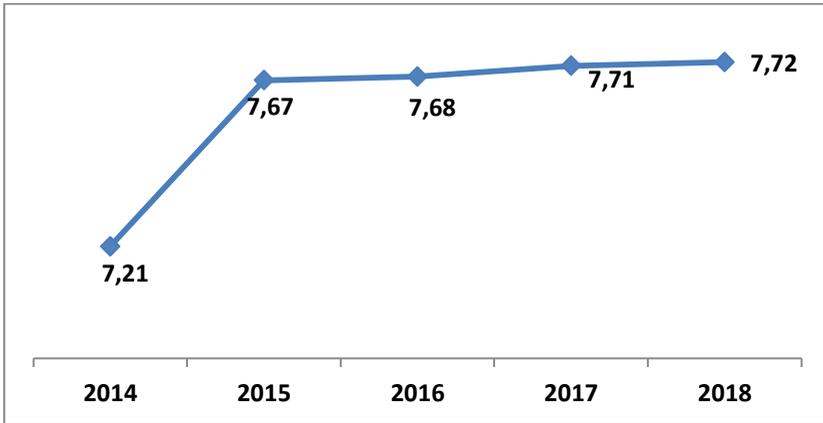
Pada tahun 2018 angka melek huruf penduduk berumur 15 tahun ke atas Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai angka 98,93 persen. Jika dilihat dari jenis kelamin nampak bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk perempuan lebih rendah dibanding penduduk laki-laki, tahun 2018 angka melek huruf 15 tahun ke atas penduduk perempuan 98,15 persen dan 99,73 persen untuk penduduk laki-laki.

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa masih ada penduduk buta huruf yaitu sebesar 1,07 persen. Persentase penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang buta huruf (1,85 persen) lebih besar daripada penduduk laki-laki (0,27 persen). Memang agak sulit untuk program pemberantasan buta huruf terhadap penduduk yang sudah berumur, diperlukan kesadaran dan peran aktif dari yang bersangkutan untuk mengikuti program ke aksaraan fungsional yang terus dikembangkan pemerintah.

## **4.2 Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah (*Means Year School/ MYS*) adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalaninya. Adanya perubahan metode penghitungan IPM, maka rata-rata lama sekolah dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan.

**Grafik 4.1. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018**



Sumber : IPM Metode Baru, BPS Kab. HSS

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2018 sebesar 7,72 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (7,71 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SLTP atau putus sekolah dikelas 2 SLTP. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, untuk mewujudkan program wajib belajar 9 tahun bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **4.3. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran penting yang dapat mencerminkan keberhasilan

suatu pembangunan dalam pendidikan yang juga dapat menjadikan gambaran tentang kualitas suatu masyarakat. Semakin tinggi persentase penduduk yang berpendidikan tinggi memperbesar peluang semakin baik kualitas sumber daya manusianya

**Tabel 4.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%)**

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tdk punya ijazah SD	16,72	22,54	19,66
SD/ Sederajat	32,13	34,15	33,15
SMP/ Sederajat	20,78	16,94	18,84
SMA/ Sederajat	20,61	17,87	19,23
DI/DII/DIII	3,19	2,30	2,74
DIV/S1/S2/S3	6,57	6,20	6,38
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 dapat kita lihat pada tabel 4.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa baru 47,19 persen yang pernah menamatkan jenjang pendidikan SMP/ sederajat ke atas. Rata-rata penduduk kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenyam pendidikan

hanya sampai tingkat SD, hal ini terlihat dari banyaknya penduduk yang tidak punya ijazah SD sebesar 19,66 persen dan hanya tamat SD/Sederajat yaitu sebesar 33,15 persen. Hal ini perlu perhatian yang serius dari pemerintah agar dimasa yang akan datang pembangunan pendidikan dapat semakin ditingkatkan.

#### **4.4. Tingkat Partisipasi Sekolah**

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 terlihat paling besar pada penduduk kelompok umur 7–12 tahun yaitu sebesar 99,27 persen, artinya

terdapat 99,27 persen penduduk usia 7–12 tahun yang masih bersekolah di SD maupun di SLTP. Tingginya APS untuk usia 7–12 tahun kemungkinan karena gencarnya kampanye program pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah di berbagai daerah secara luas dengan disertai oleh bermacam-kucuran dana bantuan pendidikan, mulai dari yang hanya terbatas pada kelompok masyarakat miskin hingga yang sifatnya menyeluruh seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akan tetapi semakin tinggi usia, APS-nya semakin mengecil. Angka Partisipasi Sekolah masing-masing kelompok usia 13-15 tahun besarnya 90,65 persen dan kelompok usia 16–18 tahun sebesar 99,27 persen. Fenomena ini layak menjadi perhatian pemerintah karena sudah merupakan masalah yang cukup serius.

Berdasarkan tabel 4.3. Pada tahun 2018 APS kelompok umur 7-12 tahun mengalami penurunan 0,22 persen dibandingkan tahun 2017 menjadi 99,27 persen. Sedangkan pada kelompok umur 16-18 tahun APS mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 4,34 persen menjadi 69,87 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2018 secara umum APS penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan APS penduduk laki-laki

untuk kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 7-12 tahun APS perempuan (98,50) lebih kecil dibandingkan APS laki-laki (100,00).

**Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2018**

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	APS			
		2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-Laki	7 - 12	99,98	99,05	100,00	100,00
	13 - 15	91,47	94,26	91,34	88,35
	16 - 18	57,54	67,01	65,67	66,34
Perempuan	7 - 12	99,98	98,75	98,92	98,50
	13 - 15	88,42	89,30	90,85	92,55
	16 - 18	64,25	79,08	65,37	75,29
Laki-Laki + Perempuan	7 - 12	99,98	98,93	99,49	99,27
	13 - 15	90,14	91,25	91,12	90,65
	16 - 18	61,11	72,66	65,53	69,87

Sumber : Diolah dari Susenas 2015-2018, BPS Kab. HSS

Selain Angka Partisipasi Sekolah, indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat waktu pada jenjang yang sesuai dengan usianya. APM dibagi menjadi tiga yaitu APM SD, APM SLTP, dan APM SLTA. dengan

kelompok umur yang sesuai untuk masing-masing jenjang adalah 7–12 tahun untuk SD, 13 –15 tahun untuk SLTP dan 16–18 tahun untuk SLTA.

**Tabel 4.4. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2018**

Jenis Kelamin	KELOMPOK UMUR	APM			
		2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-Laki	SD [7-12]	90,02	99,05	100,00	97,44
	SLTP [13-15]	76,05	71,01	72,93	72,21
	SLTA [16-18]	44,38	52,18	54,75	55,70
Perempuan	SD [7-12]	99,98	96,67	98,45	98,50
	SLTP [13-15]	64,65	77,15	82,34	75,48
	SLTA [16-18]	42,70	67,07	59,51	68,24
Laki-Laki + Perempuan	SD [7-12]	95,37	98,09	99,28	97,96
	SLTP [13-15]	71,05	74,74	77,15	74,00
	SLTA [16-18]	43,48	59,15	57,03	60,64

Sumber : Diolah dari Susenas 2015-2018, BPS Kab. HSS

Angka Partisipasi Murni (APM) selalu lebih kecil dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), baik pada jenjang pendidikan SD, SLTP, maupun SLTA. Ini menunjukkan masih banyak penduduk yang bersekolah pada jenjang yang tidak sesuai dengan umurnya.

Pada tabel 4.4. terlihat bahwa APM laki-laki lebih kecil dari APM penduduk perempuan untuk semua jenjang

pendidikan baik SD, SLTP dan SLTA. Ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA lebih banyak penduduk perempuan yang bersekolah tepat waktu daripada penduduk laki-laki.

Pada tahun 2018 secara umum terjadi penurunan pada Angka Partipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD dan SLTP sedangkan APM SLTA terjadi kenaikan. APM SD sebesar 97,96 persen pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2017 yang sebesar 99,28 persen. APM SLTP juga mengalami penurunan pada tahun 2018, dari 77,15 persen menjadi 74,00 persen. Berbeda halnya dengan APM SD dan APM SLTP, APM SLTA mengalami peningkatan dari 57,03 persen menjadi 60,64 persen. Seperti halnya APS, angka partisipasi murni (APM) juga cenderung mengalami penurunan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada APM usia anak sekolah di setiap jenjang pendidikan sangat diperhatikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan banyaknya anak yang sekolah di luar sistem pendidikan, seperti menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu dan lulus lebih awal.

## **BAB V**

### **KETENAGAKERJAAN**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen roda pembangunan di seluruh tingkat wilayah. Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan potensi untuk aktivitas kegiatan ekonomi jika di barengi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai baik dari segi pendidikan, keahlian maupun keterampilan. Dengan demikian masyarakat akan menikmati kesejahteraan sebagai manfaat langsung dari pembangunan.

Upaya pembangunan banyak diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan, misalnya skala prioritas arah pertumbuhan antara sektor informal dan formal di perkotaan. Akhir-akhir ini di sektor informal di perkotaan semakin berperan penting dalam menyerap pertumbuhan angkatan kerja, maka menjadi kurang bijaksana jika kebijakan pembangunan perkotaan lebih diarahkan pada sektor formal.

Program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu diusahakan demi terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa

yang sepadan. Dengan perluasan dan pemerataan lapangan kerja serta peningkatan mutu lapangan pekerjaan diharapkan akan dapat dikurangi perbedaan penghasilan diantara tenaga kerja yang berpenghasilan tinggi dan rendah, sehingga dengan demikian dapat ditingkatkan pemerataan pendapatan.

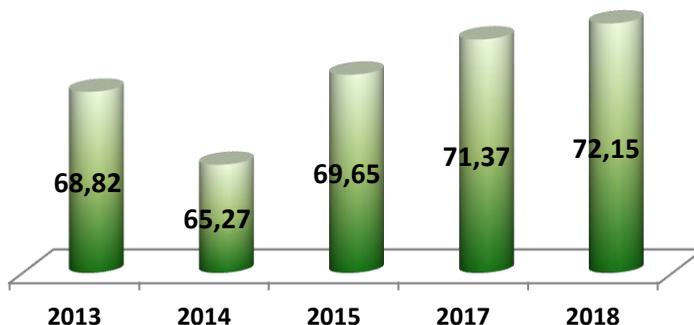
Pada tahun 2018 data tentang ketenagakerjaan untuk tingkat kabupaten bersumber dari Sakernas Tahunan (agustus) tahun 2018. Data ketenagakerjaan tahun 2016 tidak tersedia karena kegiatan Sakernas tahunan tidak diselenggarakan pada tahun tersebut. Dengan demikian pada bab ketenagakerjaan ini kami hanya bisa menyajikan sampai data tahun 2013-2015, dan tahun 2017-2018.

### **5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menggambarkan besarnya keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk usia kerja terbagi menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi

sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk yang tidak terlibat dalam pasar kerja, termasuk penduduk yang masih sekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya yang tidak tercakup dalam angkatan kerja merupakan bukan angkatan kerja.

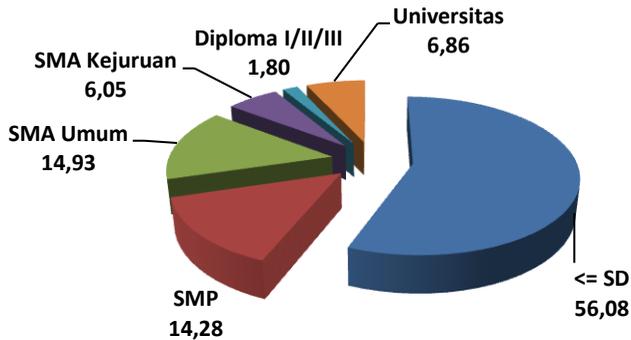
**Grafik 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013- 2015 dan 2017-2018**



Sumber : Diolah dari Sakernas 2013-2015 dan 2017-2018, BPS Kab. HSS  
Data 2016 tidak tersedia

TPAK Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama Tahun 2013-2015 dan 2017-2018 berada pada kisaran 65-72 persen. Pada tahun 2018, TPAK penduduk Hulu Sungai Selatan adalah sekitar 72,15 persen. Angka TPAK ini mengalami kenaikan dibandingkan TPAK tahun 2017 yang sebesar 71,37 persen.

**Grafik 5.2. Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%)**



Sumber : Diolah dari Sakernas 2018, BPS Kab. HSS

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah dapat ditinjau dari sisi tingkat pendidikan penduduk yang bekerja. Angkatan kerja di Hulu Sungai Selatan tahun 2018 didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD , yaitu sekitar 35,70 persen dari total angkatan kerja, bahkan angkatan kerja yang berpendidikan tidak tamat SD mencapai 20,38 persen. Sementara angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke atas hanya 29,64 persen. Hal ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih rendah.

Distribusi angkatan kerja penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur menunjukkan perbedaan

yang cukup signifikan. Pada tabel 5.1 dapat dilihat seluruh kelompok umur persentase angkatan kerja laki-laki selalu lebih besar dibandingkan persentase angkatan kerja perempuan, bahkan ada beberapa kelompok umur yang persentase angkatan kerja perempuan hampir setengah angkatan kerja laki-laki. Hal ini diantaranya disebabkan oleh faktor budaya dan ekonomi yang menempatkan penduduk laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga yang wajib mencari nafkah sehingga penduduk laki-laki banyak sebagai angkatan kerja.

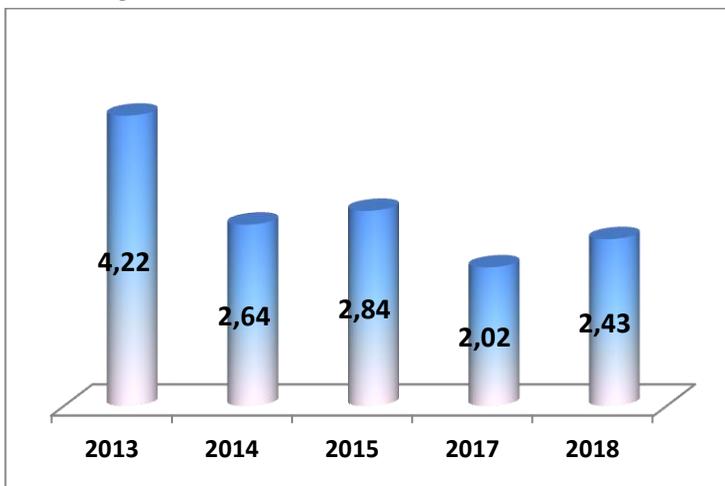
**Tabel 5.1. Distribusi Persentase Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
15-19	3,81	2,95	3,38
20-24	8,03	5,27	6,64
25-29	9,68	4,66	7,14
30-34	9,41	5,59	7,48
35-39	10,03	7,85	8,93
40-44	10,45	7,88	9,15
45-49	9,56	7,49	8,52
50-54	7,80	6,69	7,24
55-59	6,10	4,31	5,20
60-64	4,66	3,51	4,08
65+	4,81	3,96	4,38

Jumlah	84,36	60,13	72,15
--------	-------	-------	-------

Sumber : Diolah dari Sakernas 2018, BPS Kab. HSS

**Grafik 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013- 2015 dan 2017-2018**

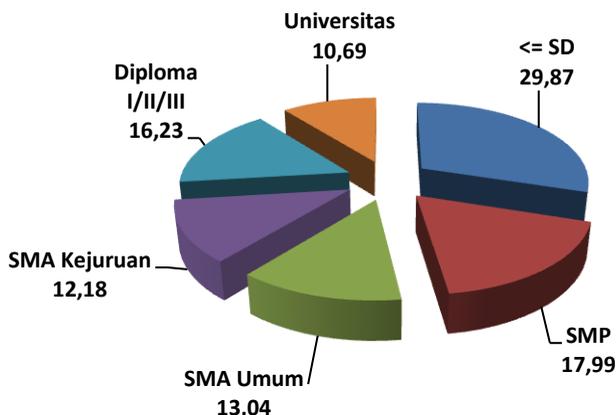


Sumber : Diolah dari Sakernas 2013-2015 dan 2017-2018, BPS Kab. HSS  
Data 2016 tidak tersedia

Selain itu ada indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pengangguran terbuka dikalangan angkatan kerja yaitu TPT (Tingkat pengangguran terbuka). Merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan penduduk angkatan kerja. TPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 adalah 2,43 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termasuk kategori pengangguran ada sekitar 2 orang. Indikator ini

mengalami peningkatan sebesar 0,41 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,02 persen.

**Grafik 5.4. Persentase Penduduk yang Statusnya Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%)**



Sumber : Diolah dari Sakernas 2018, BPS Kab. HSS

Sementara itu dari mengamati persentase penduduk yang statusnya pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan seperti terlihat pada grafik 5.4 memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Pada tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang statusnya pengangguran tertinggi pada tingkat pendidikan SLTA ke atas yaitu sebesar 52,14 persen dan tingkat pendidikan SD ke

bawah sebesar 29,87 persen, sementara yang terendah justru pada tingkat pendidikan SLTP sebesar 17,99 persen. Hal ini dapat memberikan informasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi justru berada pada resiko yang lebih tinggi untuk menjadi pengangguran.

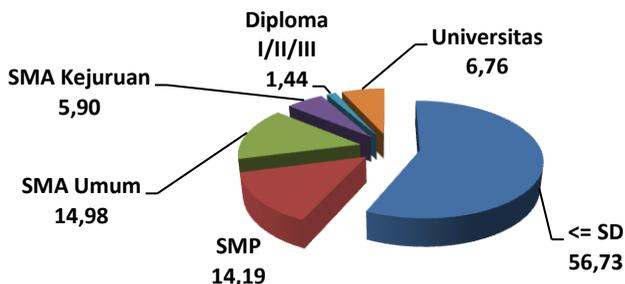
## **5.2. Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan**

Ditinjau dari kriteria tingkat pendidikan tertinggi, dari semua penduduk yang bekerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh mereka yang berijazah SD ke bawah yang mencapai 56,73 persen. Artinya sekitar 56 sampai 57 orang dari 100 orang penduduk bekerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, diantaranya sekitar 20 sampai 21 orang bahkan tidak tamat atau tidak pernah menikmati pendidikan formal. Kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat persaingan pasar kerja yang dihadapi di masa sekarang dan mendatang, dimana kebutuhan tenaga kerja membutuhkan peningkatan level pendidikan.

Oleh sebab itu para tenaga kerja dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan sulit bersaing dengan tenaga kerja yang

berasal dari luar, terutama kebutuhan tenaga kerja yang berhubungan dengan teknologi.

**Grifik 5.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%)**

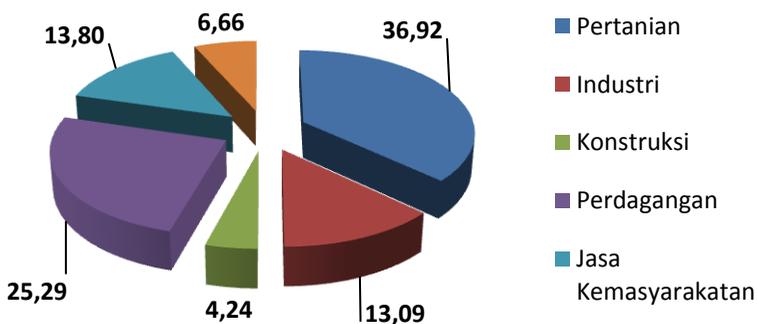


Sumber : Diolah dari Sakernas 2018, BPS Kab. HSS

Kemampuan sumber daya manusia untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan. Penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul perlu direncanakan untuk masa mendatang, sedangkan bagi para tenaga kerja yang sudah terlanjur masuk ke dunia kerja perlu mendapat bimbingan dan pelatihan peningkatan teknis dan kemampuan yang memadai agar dapat bersaing dalam pasar kerja khususnya bagi tenaga kerja yang berusia muda.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 6 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), industri (industri pengolahan), konstruksi (bangunan), Perdagangan (perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi), jasa kemasyarakatan (jasa kemasyarakatan, lembaga sosial dan perorangan) dan lainnya (sektor pertambangan, listrik, gas dan air, transportasi, pergudangan, jasa perusahaan, komunikasi, real estate dan keuangan).

**Grafik 5.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 (%)**



Sumber : Diolah dari Sakernas 2018, BPS Kab. HSS

Sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan

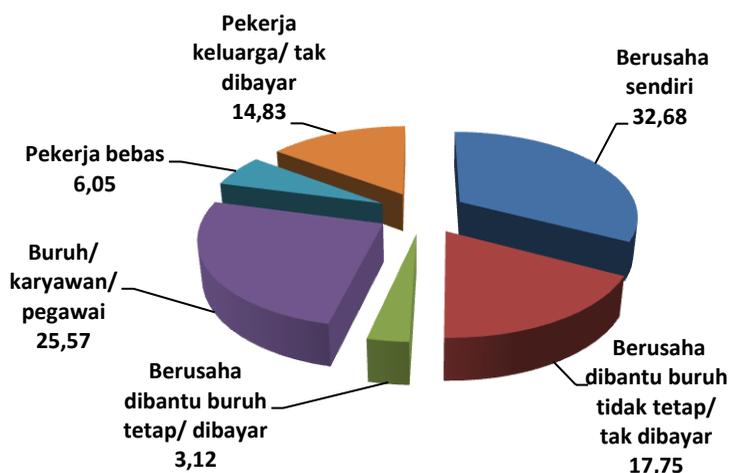
Sakernas tahun 2018, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 36,92 persen dari jumlah seluruh penduduk yang bekerja. Sektor perdagangan dan sektor jasa kemasyarakatan sebagai lapangan usaha terbanyak yang menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian. Kedua sektor ini masing-masing mempunyai masing-masing persentase sektor perdagangan 25,29 persen dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 13,80 persen. Penyerapan tenaga kerja di sektor Industri sebesar 13,09 persen, sektor konstruksi sebesar 4,24 persen dan sektor lainnya sebesar 6,66 persen.

Pada tahun 2018, penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri memiliki persentase paling tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebesar 32,68 persen. Sementara penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar memiliki persentase paling rendah, sebesar 3,12 persen (Grafik 5.7).

Hal yang perlu diperhatikan adalah masih tingginya penduduk bekerja dengan status sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Karena hampir 15 persen dari jumlah penduduk yang bekerja (14,83 persen) adalah mereka yang bekerja tetapi hanya membantu untuk mendapatkan penghasilan. Artinya

mereka memiliki aktifitas bekerja namun tidak mendapatkan kompensasi (balas jasa/upah) secara langsung atas pekerjaan mereka.

**Grafik 5.7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**



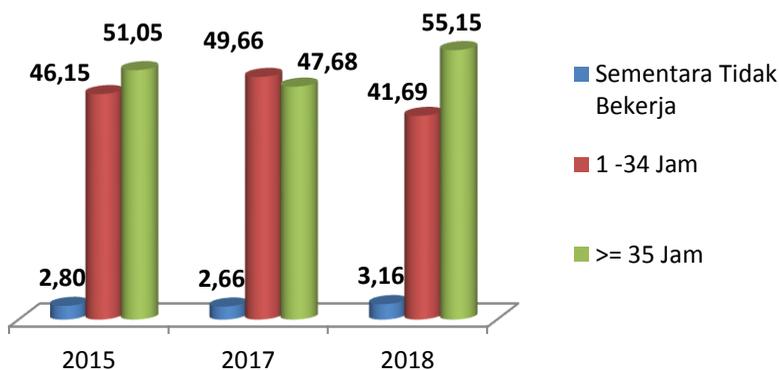
Sumber : Diolah dari Sakernas 2018, BPS Kab. HSS

### 5.3. Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran kentara atau terselubung dimana mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Biasanya pekerja semacam ini memiliki

pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya.

**Grafik 5.8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015,2017 dan 2018 (%)**



Sumber : Diolah dari Sakernas 2015, 2017 dan 2018, BPS Kab. HSS

Grafik 5.8. menunjukkan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan penduduk bekerja pada tahun 2018 dengan jumlah jam kerja lebih dari 35 jam selama seminggu sebesar 55,15 persen. Indikator ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 47,68 persen. Selebihnya

sebesar 41,69 persen adalah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan 3,16 persen mereka yang sementara tidak bekerja saat pendataan dilaksanakan.

Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak penuh terdiri dari :

- Setengah menganggur : mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (terpaksa)
- Pekerja paruh waktu : mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (setengah pengangguran sukarela)

Pada tabel 5.2 menggambarkan bahwa lebih dari seperempat (34,16 persen) penduduk angkatan kerja berstatus sebagai pekerja paruh waktu dan 6,52 persen berstatus sebagai setengah pengangguran. Hal demikian harus menjadi perhatian pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya terutama lapangan kerja yang bisa menjadi pegangan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak.

**Tabel 5.2. Persentase Pengangguran, setengah Pengangguran dan Pekerja Paruh waktu Terhadap Jumlah Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 (%)**

Uraian	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
- Pengangguran	2,45	2,40	2,43
- Setengah Pengangguran	6,96	5,91	6,52
- Pekerja Paruh Waktu	27,79	42,95	34,16

Sumber : Diolah dari Sakernas 2018, BPS Kab. HSS



# BAB VI

## POLA KONSUMSI DAN KEMISKINAN

### 6.1 Pola Konsumsi

Pola pengeluaran/konsumsi penduduk merupakan informasi untuk melihat kesejahteraan penduduk. Besarnya nilai nominal (rupiah) yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun non makanan, secara tidak langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga, untuk mencukupi kebutuhan yang mencakup barang dan jasa.

Secara umum konsumsi/pengeluaran rumah tangga terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran tersebut, dapat dilihat bagaimana pola konsumsi masyarakat. Tingkat kebutuhan/permintaan (*demand*) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas akan mendahulukan pemenuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring

dengan peningkatan pendapatan maka semakin lama akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan (kalau bukan disimpan/ditabung atau diinvestasikan kembali).

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dan perubahan komposisinya sebagai indikasi perubahan tingkat kesejahteraan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Sebaliknya di negara-negara

maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa, merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran tersebut tidak bersifat primer lagi, antara lain pengeluaran untuk perawatan kesehatan, perawatan kecantikan, peningkatan pendidikan, rekreasi, olah raga dan sebagainya.

Data pengeluaran dan konsumsi penduduk menurut kelompok barang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang mencakup semua provinsi di Indonesia. Pengeluaran rumah tangga adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri. Sedangkan pengeluaran rata-rata perkapita adalah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

**Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**

Golongan Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan (RP)	Persentase
(1)	(2)
< 1.000.000	7,13
1.000.000 - 1.999.999	22,00
2.000.000 - 2.999.999	28,12
>= 3.000.000	42,75

Jumlah/Total	100,00
--------------	--------

Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

**Tabel 6.2. Persentase Pengeluaran Perkapita/Bulan Menurut Golongan Pengeluaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**

Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan (RP)	Persentase
(1)	(2)
< 300.000	1,00
300.000 - 499.999	12,24
500.000 - 749.999	32,36
750.000 - 999.999	20,82
1.000.000 – 1.499.999	18,69
1.500.000 +	14,89
Jumlah/Total	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

Dari Hasil Susenas 2018, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kelompok pengeluaran lebih dari Rp.3.000.000,- sebanyak 42,75 persen dan kelompok pengeluaran Rp. 2.000.000,- s.d Rp 2.999.999,- sebanyak 28,12 persen. Sementara untuk pengeluaran perkapita per bulan, persentase terbesar pada kelompok pengeluaran Rp. 500.000 s.d Rp. 749.000,- sebesar 32,36 persen dan kelompok pengeluaran lebih dari Rp.750.000,- s.d Rp.999.999,- sebesar 20,82 persen.

**Tabel 6.3 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018**

Jenis Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan					
	Nominal (Rp)			Persentase (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Makanan</b>	<b>510.074</b>	<b>523.827</b>	<b>572.257</b>	<b>53,96</b>	<b>57,38</b>	<b>57,09</b>
<b>Non Makanan</b>	<b>435.285</b>	<b>389.006</b>	<b>430.066</b>	<b>46,04</b>	<b>42,62</b>	<b>42,91</b>
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	195.091	178.969	222.950	20,72	19,61	22,24
Aneka Barang dan Jasa	83.285	88.006	94.206	8,81	9,64	9,40
Pakaian, Alas Kaki, Tutup Kepala	29.444	27.026	29.095	3,12	2,96	2,90
Barang Tahan Lama	77.553	51.072	44.081	8,20	5,59	4,40
Lainnya	49.101	43.932	39.735	5,19	4,81	3,96
<b>Jumlah</b>	<b>945.359</b>	<b>912.833</b>	<b>1.002.323</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber :Diolah dari Susenas 2016-2017, BPS Kab. HSS

Berdasarkan Tabel 6.3 di atas terlihat bahwa selama periode 2017-2018 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan pada tahun tersebut. Pada tahun 2017 sebesar Rp 912.833,- dan pada tahun 2018 telah mencapai Rp 1.002.323,-. Akan tetapi pada tahun 2017 rata-rata pengeluaran perkapita perbulan mengalami penurunan menjadi Rp 912.833,- bila

dibandingkan pengeluaran perkapita tahun 2016. Bila dilihat persentasenya pengeluaran untuk non makanan mengalami peningkatan dari 42,62 persen pada tahun 2017 menjadi 42,91 persen pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2018 persentase pengeluaran makanan mengalami penurunan menjadi 57,09 persen dibandingkan persentase pengeluaran makanan tahun 2017. Sedangkan persentase pengeluaran makanan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 57,38 persen dibandingkan persentase pengeluaran makanan pada tahun 2016. Hal ini menggambarkan bahwa lebih dari separuh pengeluaran penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan.

Pada Tabel 6.3 dapat terlihat adanya penurunan pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada pengeluaran untuk aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama dan lainnya, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa menurun dari 9,64 persen pada tahun 2017 menjadi 9,40 persen pada tahun 2018. Pengeluaran untuk pakaian juga menurun dari 2,96 persen pada tahun 2017 menjadi 2,90 persen pada tahun 2018. Pengeluaran barang tahan lama juga menurun 5,59 persen dari tahun 2017 menjadi 4,40 persen pada tahun 2018. Penurunan pengeluaran pada tahun 2017

juga terjadi pada pengeluaran untuk pajak, pungutan, asuransi dan keperluan pesta dan upacara dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 3,96 persen. Selanjutnya hanya pengeluaran untuk keperluan perumahan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 menjadi sebesar 22,24 persen pada tahun 2018 yang meliputi biaya sewa rumah, pemeliharaan dan perbaikan ringan, serta pengeluaran untuk listrik, air, dan lain-lain (Tabel 6.3).

**Tabel 6.4 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**

Jenis Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan	
	Nominal (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)
<b>MAKANAN</b>		
A. PADIZAN	59.027	5,89
B. UMBI-UMBIAN	1.549	0,15
C. IKAN/UDANG/CUMI	59.042	5,89
D. DAGING	11.959	1,19
E. TELUR & SUSU	26.508	2,64
F. SAYUR-SAYURAN	23.147	2,31
G. KACANG -KACANGAN	6.206	0,62
H. BUAH-BUAHAN	22.322	2,23
I. MINYAK DAN LEMAK	13.266	1,32
J. BAHAN MINUMAN	16.650	1,66
K. Bumbu2AN	9.205	0,92
L. KONSUMSI LAINNYA	14.375	1,43
M. MAKANAN DAN MINUMAN JADI	262.525	26,19
N. TEMBAKAU DAN SIRIH	46.476	4,64

<b>TOTAL</b>	<b>572.257</b>	<b>57,09</b>
<b>NON MAKANAN</b>		
PERUMAHAN DAN FASILITAS RUMAH TANGGA	222.950	22,24
ANEKA BARANG & JASA	94.206	9,40
PAKAIAN, ALAS KAKI, DAN TUTUP KEPALA	29.095	2,90
BARANG TAHAN LAMA DURABLE GOODS	44.081	4,40
PAJAK, PUNGUTAN, DAN ASURANSI	28.159	2,81
KEPERLUAN PESTA DAN UPACARA	11.576	1,15
<b>TOTAL</b>	<b>430.066</b>	<b>42,91</b>

Sumber : Estimasi Susenas 2017, BPS Kab. HSS

## 6.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat kompleks yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dan masih dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu isu global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* disingkat dengan **SDGs** Tujuan pertama SDGs yang berbunyi **Mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk** mempunyai target yaitu sebagai berikut :

1. Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan daya beli kurang dari \$1,25

PPP (*Purchasing Power Parity*) atau sekitar Rp 7.800 per hari.

2. Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional.
3. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Tahun 2030 berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
4. Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi (seperti halnya hak layanan dasar), kepemilikan dan akses pada lahan. Memastikan mereka memperoleh akses teknologi.
5. Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro, daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan bencana.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang di ukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi pada setiap negara, termasuk Indonesia. Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua

komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

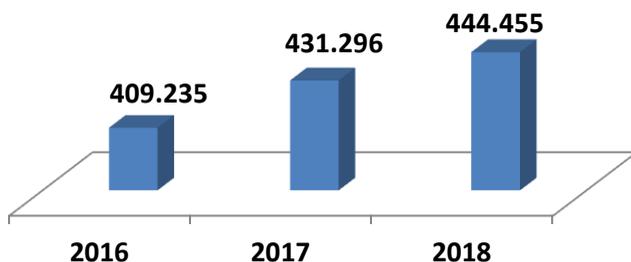
Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar yang diukur dari tingkat konsumsi atau pengeluaran ada 3 ukuran kemiskinan yang digunakan yaitu, :

- *Head Count Index (HCI- $P_0$ )* yaitu persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (GK)
- Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-  $P_1$* ) yang merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
- Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-  $P_2$* ) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan di antara penduduk miskin.

Penghitungan penduduk miskin tidak terlepas dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Garis kemiskinan yang digunakan sebagai batas untuk mengelompokan penduduk miskin dan

tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2018, garis kemiskinan perkapita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 444.455,-. Hal ini berarti bahwa penduduk yang pengeluaran untuk konsumsinya perbulan kurang dari Rp. 444.455,- dapat dikatakan sebagai penduduk miskin. Besaran garis kemiskinan tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2017.

**Grafik 6.1 Garis Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018 (Rp/Kap/Bulan)**

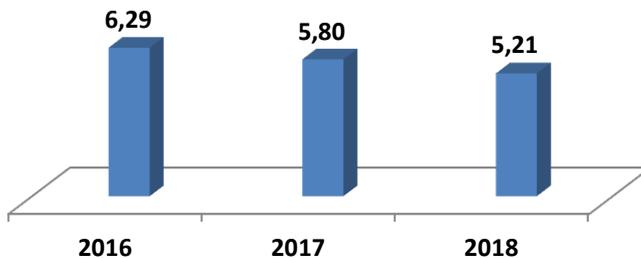


Sumber : Diolah dari Susenas 2016-2018, BPS Kab. HSS

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan lebih kecil dari kemiskinan. Penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12,2 ribu orang atau

sekitar 5,21 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 13,4 ribu orang atau 5,80 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berkurangnya penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di dukung dengan banyaknya realisasi program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di antaranya Program Rumah Sejahtera (Bedah Rumah), Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin/Ranstra), dan program-program pendukung penanggulangan Kemiskinan lainnya.

**Grafik 6.2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018 (%)**

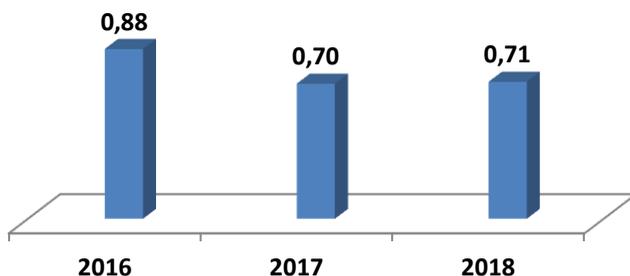


Sumber : Diolah dari Susenas 2016-2018, BPS Kab. HSS

Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2018, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,71. Perubahan angka indeks ini cukup fluktuatif. Jika dibandingkan tahun 2017 angka ini mengalami sedikit kenaikan. Namun jika dibandingkan pada tahun 2016, dalam kurun waktu 3 tahun, terjadi penurunan angka indeks kedalaman kemiskinan dari 0,88 menjadi 0,71. Nilai  $P_1$  yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai  $P_1$  yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

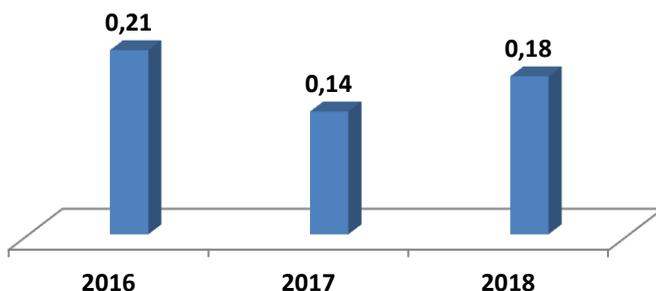
**Grafik 6.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018**



**Sumber : Diolah dari Susenas 2016-2018, BPS Kab. HSS**

Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami penurunan pada tahun 2017 (0,14) dibandingkan tahun 2016 (0,21), tetapi di tahun 2018 kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi (0,18). Hal ini menggambarkan masih ada ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Grafik 6.4 Indeks Keparahhan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018**



Sumber : Diolah dari Susenas 2016-2018, BPS Kab. HSS

### 6.3 Distribusi Pendapatan

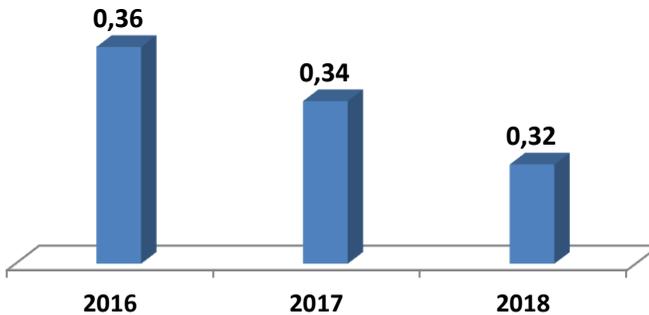
Peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilihat dari peningkatan pendapatan idealnya di ikuti dengan pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Salah satu indikator untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan penduduk adalah gini ratio. Indeks gini adalah ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar nol (pemerataan sempurna, dimana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva *Lorenz* dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva *Lorenz* berada.

Secara umum angka Gini Ratio dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 0 < Gini Ratio  $\leq$  0,35 -----→ketimpangan rendah
- 0,35 < Gini Ratio  $\leq$  0,50 -----→ketimpangan sedang
- Gini Ratio > 0,50 -----→ketimpangan tinggi

**Grafik 6.5 Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2018**



**Sumber : Diolah dari Susenas 2016-2018, BPS Kab. HSS**

Nilai dari indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Jika rasio lebih dari 0,5, maka terjadi ketimpangan yang cukup tajam dan serius, dan jika rasio berkisar 0,30 – 0,49 maka

distribusi pendapatan relatif merata. Olah data Susenas menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 gini rasionya sebesar 0,32. Pada tahun 2018 gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada dalam interval 0,30-0,49, hal ini bearti bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif merata. Besaran Indeks Gini Ratio relatif mengalami penurunan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Demikian juga pada tahun 2018 menjadi 0,32 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2017 (0,34). Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih rendah.

## **BAB VII**

# **PERUMAHAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Di samping kebutuhan pangan dan sandang, kebutuhan akan perumahan (papan) merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang. Rumah merupakan tempat berteduh dari cuaca panas dan hujan, tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga, tempat menyimpan berbagai barang kebutuhan, menjadi ciri khas budaya serta berbagai kegunaan lainnya.

Sekelompok penduduk yang membangun rumah pada suatu wilayah akan membentuk lingkungan baru berupa sebuah pemukiman penduduk. Biasanya suatu komunitas penduduk yang mendiami suatu wilayah menuai berbagai masalah sebagai sebuah konsekuensi terciptanya suatu peradaban. Konsekuensi tersebut berupa masalah-masalah sosial budaya dan kependudukan seperti masalah kesehatan, sanitasi, maupun hubungan antar masyarakat.

Kebutuhan akan perumahan kian bertambah seiring dengan penambahan jumlah penduduk, terlebih di daerah-

daerah perkotaan. Permasalahan yang akhirnya timbul bukan hanya bagaimana membangun perumahan penduduk, tapi juga bagaimana menyediakan lokasi pemukiman dan fasilitas sosial serta fasilitas lainnya yang tertata secara rapi agar tidak menimbulkan masalah sosial di kemudian hari.

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pembangunan perumahan yang semakin pesat adalah bergesernya penggunaan lahan yang semula digunakan sebagai lahan pertanian secara perlahan-lahan berkurang karena pemanfaatannya dialihkan menjadi daerah pemukiman, sehingga akan berdampak negatif pada produksi hasil pertanian. Di samping itu juga akan timbul masalah lingkungan alam seperti pencemaran tanah dan air.

Untuk meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat pembangunan perumahan, sangat diperlukan peran pemerintah dalam mengatur tata guna lahan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung lingkungan yang tersedia. Perumahan dan fasilitas tempat tinggal merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan. Unsur-unsur rumah yang sering menjadi indikator perumahan adalah kualitas dan

fasilitas bangunan.

### 7.1. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

**Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018(%)**

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Persentase
(1)	(2)
Milik sendiri	83,09
Kontrak / Sewa	4,10
Bebas sewa	12,50
Lainnya	0,31
Total	100,00

\*) termasuk rumah lainnya adalah rumah dinas, rumah adat dll

Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

Berdasarkan tabel 7.1 terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati rumah sendiri. Besarnya angka kepemilikan rumah sendiri mengindikasikan bahwa pembangunan perumahan secara umum berjalan dengan dinamis seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan tingkat kesejahteraan. Perkembangan sektor perumahan yang dinamis hendaknya turut pula diimbangi dengan keselarasan dampaknya terhadap lingkungan, agar pembangunan rumah dan bangunan tetap ramah terhadap lingkungan.

## **7.2 Kondisi Fisik Tempat Tinggal**

Kondisi bangunan secara kasat mata dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dicerminkan melalui kelayakan rumah sebagai tempat tinggal. Beberapa indikator fisik perumahan yang relevan antara lain luas dan jenis lantai, atap, dan dinding.

Lantai rumah merupakan salah satu sarana berkumpul dan bermain anggota rumah tangga. Lantai yang luas dan jenisnya yang berkualitas lebih memungkinkan anggota rumah tangga untuk beraktivitas dengan nyaman. Relevansinya dengan kesehatan, lantai menjadi sarana kontak anggota rumah

tangga dengan kemungkinan berbagai penyakit. Bahkan jenis lantai ini merupakan salah satu variabel dalam penentuan keluarga sejahtera atau pra sejahtera. Dengan demikian jenis dan luas lantai disamping menggambarkan keadaan sosial ekonomi juga amat vital dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah luas lantai per kapita yang merupakan rata-rata luas lantai yang ditempati tiap anggota rumah tangga.

**Tabel 7.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Luas Lantai Per Rumah Tangga dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018(%)**

Luas Lantai (m <sup>2</sup> )	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<=19	4,72	3,36	3,76
20-49	27,46	39,80	36,13
50-99	50,24	46,04	47,29
100-149	10,89	8,99	9,55
>=150	6,70	1,81	3,27
Total	100,00	100,00	100,00

**Sumber : Diolah dari Susenas 2017, BPS Kab. HSS**

Rata-rata luas lantai per rumah tangga di kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 adalah 63,67 m<sup>2</sup> dengan rata-rata luas lantai perkapita 24,34 m<sup>2</sup>. Bila dibandingkan dengan

standar tertentu misalnya menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m<sup>2</sup> (BPS, 2001). Sedangkan menurut SK Menteri Perumahan Rakyat menyatakan luas lantai perkapita yang layak huni adalah lebih dari 7,2 m<sup>2</sup>. Standar *American Public Health Assosiaaciation (APHA)* yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Artinya satu rumah tangga yang terdiri dari 4 orang, idealnya memiliki luas lantai minimal 40 m<sup>2</sup>.

**Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Perkapita (Kriteria Rumah Sehat) dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018(%)**

Luas Lantai (m2)	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Pedesaan
≤7,2	2,35	6,49	5,26
< 8	3,25	7,32	6,11
< 10	12,10	17,94	16,21

**Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS**

Berdasarkan tabel 7.3. dapat dilihat bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 masih ada penduduk yang menghuni rumah tidak sehat dengan rata-rata luas lantai perkapita  $\leq 7,2$  m<sup>2</sup> yakni sebesar 5,26 persen. Sedangkan bila

yang digunakan syarat rumah sehat Kementerian Kesehatan maka pada tahun 2018 persentase tersebut menurun dibandingkan tahun 2017 menjadi 6,11 persen, dan jika yang digunakan adalah ukuran APHA, maka ada sekitar 16,21 persen penduduk yang menghuni rumah dengan ukuran luas lantai perkapita yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

**Tabel 7.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 -2018**

Indikator Kualitas Perumahan	Tahun		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Bukan Tanah (%)	100,00	100,00	100,00
Atap terluas Beton, Genteng, Sirap, Seng, dan Asbes (%)	93,40	93,51	95,75
Dinding Terluas Tembok, plesteran dan Kayu (%)	99,59	99,33	98,54
Rata-rata Luas Lantai Perkapita (m <sup>2</sup> )	20,21	23,76	24,34

**Sumber : Diolah dari Susenas 2016-2018, BPS Kab. HSS**

Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018, berdasarkan data Susenas 2016 sampai 2018, secara umum persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantaikan terluas bukan tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan persentase mendekati 100 persen artinya hampir tidak ada rumah yang luas lantai terluasnya adalah tanah. Adapun bahan yang paling banyak digunakan sebagai lantai adalah kayu/papan sebesar 84,35 persen. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan banyak daerah rawa.

Selain jenis lantai, indikator lain yang berhubungan dengan kualitas tempat tinggal adalah atap dan dinding terluas yang digunakan serta rata-rata luas lantai perkapita. Berdasarkan Tabel 7.4. persentase rumah tinggal yang menggunakan atap beton, sirap, genteng, seng dan asbes dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan. Persentase rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu, pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yaitu mencapai 98,54 persen. Sedangkan rata-rata luas lantai perkapita pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 dan 2017 yaitu menjadi 24,34 meter persegi.

### 7.3 Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

**Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**

Fasilitas Perumahan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumber Air Minum Bersih (%)	80,55	43,66	54,63
Jamban Sendiri (%)	85,68	66,84	72,44
TPAT dengan Tangki (%)	91,02	67,58	75,55
Sumber Penerangan Listrik	100,00	98,27	98,79
Sanitasi Layak (%)	91,02	67,58	75,55
Sumber Air Minum Layak (%)	50,21	29,26	35,49

**Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS**

Sumber air minum merupakan sumber air yang digunakan untuk keperluan air minum oleh rumah tangga.

Berdasarkan jenisnya, sumber air minum dapat dikelompokkan menjadi sumber air minum bersih dan tidak bersih. Sumber air bersih terdiri dari air minum yang bersumber dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa dan air dari sumber terlindung dengan jarak ke pembuangan tinja sama atau lebih dari 10 m. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menggunakan air minum bersih sebanyak 54,63 persen. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, ada kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, dimana diperkotaan persentase rumah tangga yang minum air bersih mencapai 80,55 persen, sedangkan didaerah perdesaan hanya sekitar 43,66 persen. Hal ini patut jadi perhatian pemerintah daerah untuk menyediakan program penyediaan air bersih khususnya daerah perdesaan.

Salah satu indikator perumahan yang berhubungan dengan sanitasi adalah keberadaan tempat buang air besar (BAB). Indikator ini juga terkait dengan kesadaran masyarakat pada kesehatan. Teknologi tempat buang air besar (BAB) untuk daerah perdesaan berbeda dengan teknologi jamban di daerah perkotaan. Pada tahun 2018, persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri sebesar 72,44 persen. Menurut

daerah tempat tinggal pada tahun 2018, persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri di daerah perkotaan sebesar 85,68 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 66,84 persen.

Disamping telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2018 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik mencapai 75,55 persen. Menurut daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik di daerah perkotaan sebesar 91,02 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 67,58 persen.

Sebagai salah indikator yang digunakan dalam penghitungan tujuan SDGs adalah sanitasi layak. Rumah tangga dikatakan mempunyai sanitasi layak apabila memiliki fasilitas tempat buang air besar (baik sendiri atau bersama) dan menggunakan kloset leher angsa serta tempat pembuangan akhirnya tangki/SPAL. Berdasarkan data Susenas 2018, persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi layak sebesar 75,55 persen. Jika dilihat dari daerah

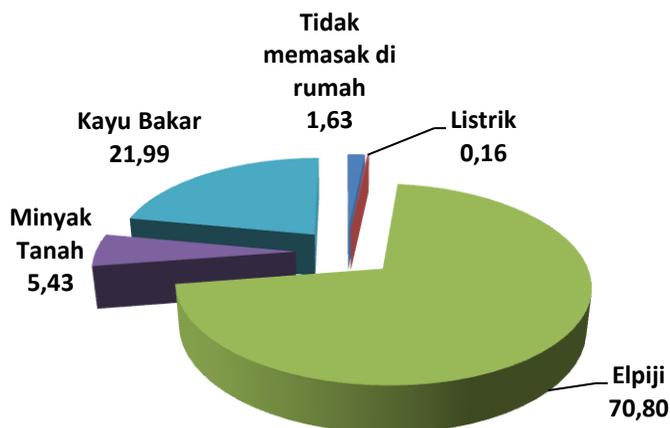
tempat tinggal, persentase rumah tangga di perkotaan yang mempunyai sanitasi layak lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, dimana daerah perdesaan baru sebesar 67,58 persen, sedangkan daerah perkotaan mencapai 91,02 persen.

Fasilitas penerangan rumah terdiri dari rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN dan non PLN) dan yang menggunakan penerangan selain listrik seperti lampu minyak, obor, dan lain-lain termasuk yang tidak menggunakan penerangan. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan pada tahun 2018 mencapai 98,79 persen. Antara daerah perkotaan dan perdesaan akses penerangan listrik sudah cukup baik terlihat pada fasilitas penerangan, dimana pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan pada daerah perkotaan mencapai hampir 100 persen dan daerah perdesaan mencapai 98,27 persen.

Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai sumber air minum layak apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari leding, air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata air terlindung) dengan jarak  $\geq 10$  m dari penampungan kotoran/limbah, dan

air hujan (Rumus lama). Berdasarkan data Susenas 2018 persentase rumah yang mempunyai sumber air minum layak mencapai 35,49 persen. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang mempunyai sumber air minum layak di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, yaitu masing-masing sebesar 50,21 persen dan 29,26 persen.

**Grafik 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Memasak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**



**Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS**

Ditinjau dari bahan bakar utama untuk memasak, sebagian besar rumah tangga telah menggunakan gas/elpiji (70,80 persen) sebagai sumber energi utama untuk memasak.

Selain itu masih terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama memasak (21,99 persen).

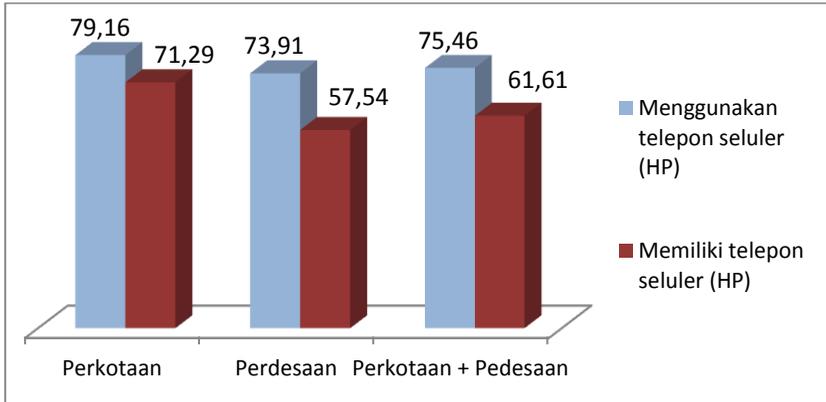
Terkait dengan indikator *SDGs* (*Sustainable Development Goals*) mengenai Salah satu Goal SDG's adalah energi bersih dan terjangkau (*affordable and clean energy*) yaitu Goal 7. Target Goal 7 yang merupakan agenda 2030 meliputi tercapainya akses universal pada energi, terjangkau dan handal; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; menggandakan energi efisiensi; mendukung pembangunan infrastruktur energi dan teknologi untuk penyediaan akses energi berkelanjutan. Potensi energi terbarukan seperti biomasa, panas bumi, energi surya, energi air, dan energi angin cukup besar. Jenis sumber energi terbarukan (*renewable energy*) yang dimiliki Indonesia cukup banyak. Jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik diyakini dapat menggantikan energi fosil. Terkait kebutuhan bahan bakar biomassa WHO mendefinisikan biomassa sebagai bahan bakar yang berasal dari hewan atau tumbuhan, sementara Kementerian Pertambangan dan Energi mendefinisikan biomassa adalah kayu bakar, arang, batu bara, sekam, batang padi, tandan kelapa dan tempurung kelapa (Laporan MDGs, Februari 2004)

Pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi manusia, sehingga masyarakat secara perlahan dapat meninggalkan kayu bakar sebagai energi utama untuk memasak. Selain itu beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak pembakaran bahan bakar padat sangat berbahaya bagi kesehatan karena memudahkan manusia terkena infeksi pernapasan. Bahaya dimungkinkan karena rumah di Indonesia rata-rata dirancang tanpa cerobong asap guna saluran pembuangan asap dan umumnya ventilasi dapur hanya berupa satu lubang di langit-langit atau dinding dapur.

#### **7.4 Teknologi Informasi dan Komunikasi**

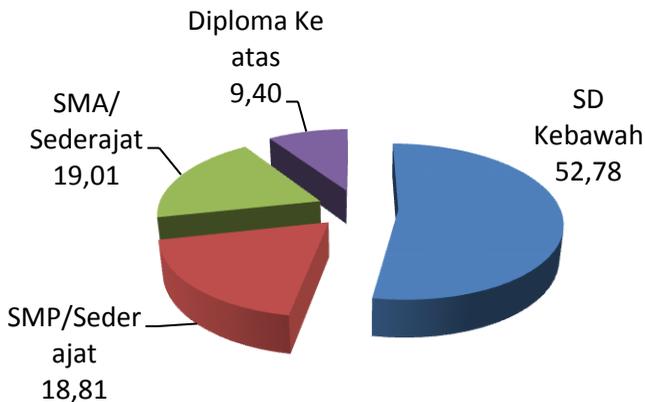
Ditinjau dari fasilitas informasi dan komunikasi (TIK) yang di akses penduduk usia 5 tahun keatas. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki/menguasai telepon seluler (HP) dalam tiga bulan terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 sebesar 61,61 persen. Jadi lebih dari separuh penduduk usia 5 tahun ke atas kabupaten Hulu Sungai Selatan menguasai/memiliki telepon seluler (HP). Sedangkan penduduk usia 5 tahun keatas yang menggunakan telepon seluler mencapai 75,46 persen pada tahun 2018.

**Grafik 7.2. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Menguasai/Memiliki dan Menggunakan Telepon Seluler (HP) dalam Tiga Bulan Terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**



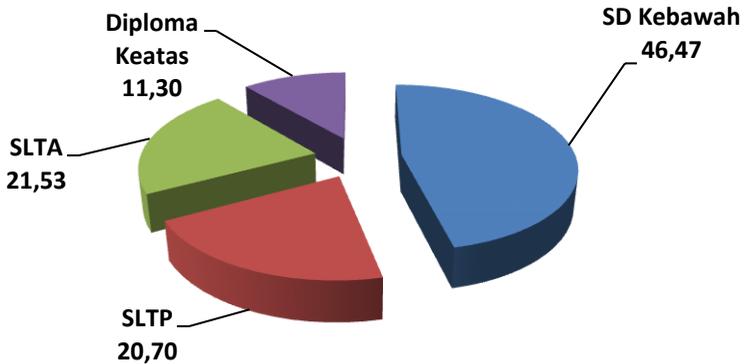
Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

**Grafik 7.3. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018(%)**



Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

**Grafik 7.4. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018(%)**

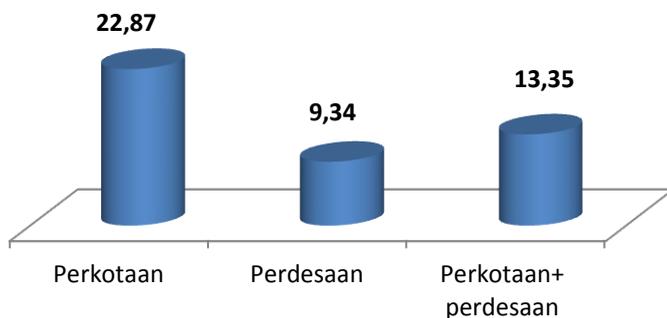


**Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS**

Pada grafik 7.2 penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki telepon seluler (HP) daerah perkotaan persentasenya lebih besar dari daerah pedesaan yaitu masing-masing 71,29 persen dan 57,54 persen. Tetapi baik daerah perkotaan dan pedesaan lebih dari 50 persen penduduk usia 5 tahun ke atas sudah memiliki telepon seluler (HP). Selain itu dari sisi penggunaan telepon seluler persentase penduduk usia 5 tahun sudah sangat tinggi yaitu mencapai 75,46 persen. Dilihat dari tingkat pendidikan, persentase terbesar penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler (hp) dan memiliki telepon seluler (hp) dalam tiga bulan terakhir adalah yang

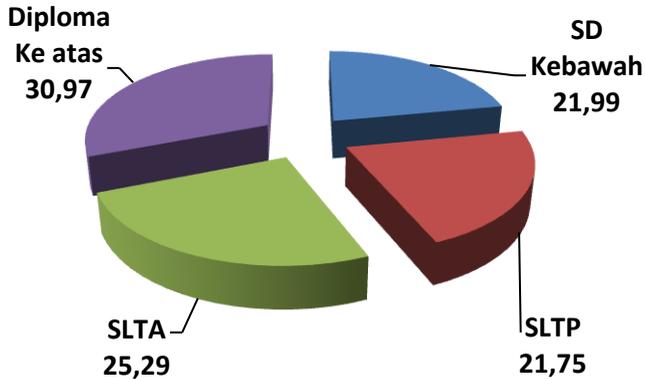
berpendidikan SD kebawah yaitu masing-masing sebesar 52,78 persen dan 46,47 persen. Dari Semakin pesatnya kemajuan telepon seluler yang telah dilengkapi fitur-fitur untuk kamera, games, penjelajahan di dunia maya dan lain-lain, menjadi alasan masyarakat lebih memilih telepon seluler (HP) sebagai alat komunikasi.

**Grafik 7.5 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**



Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

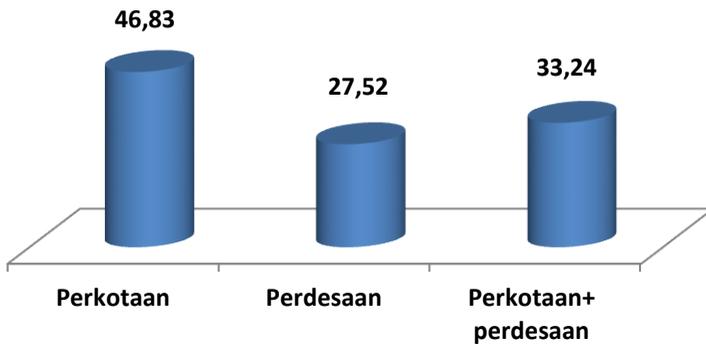
**Grafik 7.6. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Menggunakan Komputer dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018(%)**



**Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS**

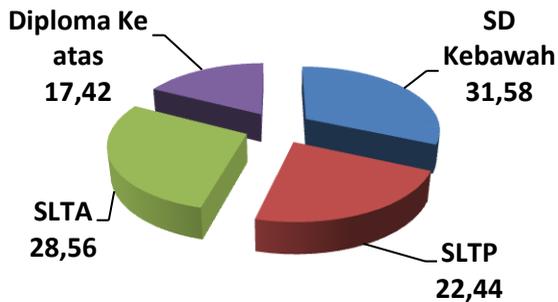
Pada tahun 2018, Persentase penduduk usia 5 tahun yang menggunakan komputer (PC/dekstop, laptop/notebook, tablet) dalam tiga bulan terakhir sebesar 13,55 persen dari total penduduk usia 5 tahun ke atas Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dilihat dari tingkat pendidikan, persentase terbesar penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer dalam tiga bulan terakhir adalah yang berpendidikan diploma ke atas yaitu sebesar 30,97 persen. Hal ini menunjukkan penduduk yang berpendidikan tinggi sebagian besar menggunakan komputer untuk menunjang pengetahuannya ataupun pekerjaannya.

**Grafik 7.7. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**



Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

**Grafik 7.8. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018(%)**



Sumber : Diolah dari Susenas 2018, BPS Kab. HSS

Sementara itu pada tahun 2018 penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir

sebelum pendataan sebesar 33,24 persen dari total penduduk usia 5 tahun ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di tinjau dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, persentase terbesar penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet adalah yang tingkat pendidikan tertingginya adalah SD kebawah sebesar 31,58 persen dan SLTA sebesar 28,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet tidak terbatas untuk penduduk yang berpendidikan tinggi saja karena kemudahan dalam aksesnya.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELATIHAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN